



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi



2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Tahun Anggaran 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021. Laporan ini disusun berdasarkan hasil capaian sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Rencana yang sudah dilaksanakan dapat terlaksana dengan beberapa kendala yang menghambat. Selain itu, adanya arahan penting Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk segera diselesaikan.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan hasil dan penjelasan capaian kinerja/kegiatan pada Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, meliputi: Asisten Deputy Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air; Asisten Deputy Bidang Pengembangan Wilayah; Asisten Deputy Bidang Konektivitas; Asisten Deputy Bidang Industri Pendukung Infrastruktur; dan Asisten Deputy Bidang Industri Maritim dan Transportasi sampai akhir Tahun Anggaran 2021.

Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban, kinerja yang telah ditetapkan, pendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2022

Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Ayodhia G.L. Kalake



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Gambar.....	4
Daftar Tabel	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1.Latar Belakang	6
1.2.Tugas Pokok dan Fungsi Kedeputian	9
1.3. Struktur Organisasi	10
BAB II RENCANA KINERJA TAHUN 2021	12
2.1. Perjanjian Kinerja.....	12
2.2. Rencana dan Target Kinerja	12
2.2.1.Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Menjadi Kebijakan Menteri Koordinator	15
2.2.2.Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Dihasilkan.....	15
2.2.3.Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Dihasilkan	15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1.Capaian Kinerja Unit Organisasi.....	16
3.1.1.Capaian pada Penyusunan Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Transportasi.....	16
3.1.2.Capaian Kinerja Unit ES 2 beserta Jumlah Rancangan Kebijakan , Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Dihasilkan.....	28
Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah.....	42
Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur	68
Sekretariat deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi	94
BAB 4 PENUTUP	121
Kesimpulan	121
Rekomendasi	122
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	11
Gambar 2 Pilar Daya Saing	17
Gambar 3 Indikator Penilaian Indeks Daya Saing Infrastruktur	18
Gambar 4 Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia kurun waktu 2017-2019	19
Gambar 5 Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia kurun waktu 2017-2019	29
Gambar 6 Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia diantara Negara ASEAN	30
Gambar 7 Infrastruktur Perwilayahan dan Penataan Ruang	51
Gambar 8 Sistem Logistik Mendukung Penurunan Disparitas Harga	52
Gambar 9 Infrastruktur Perekonomian	55
Gambar 11 Penandatanganan MoU Sistem Kearsipan antara Kemenko Marves dan ANRI	108
Gambar 12 Presentasi oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	109
Gambar 13 Serah Terima Hasil Pekerjaan Arsip Inaktif dari ANRI kepada Kedeputian Infrastruktur dan Transportasi	109
Gambar 15 Tanda Tangan Komitmen Bersama ZI di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	111

DAFTAR TABEL

Table 1 Capaian Kinerja Deputy	25
Table 2 Proyeksi Matriks LAKIP TA 2021 Asisten Deputy Infrastruktur Dasar, Perkotaan Dan Sumber Daya Air.....	37
Table 3 Tabel Perbandingan Capaian 2020 dan 2021	38
Table 4 Tabel Perbandingan Capaian TW I 2021	39
Table 5 Tabel Perbandingan Capaian TW II 2021	40
Table 6 Tabel Perbandingan Capaian TW III 2021	41
Table 7 Perbandingan Capaian TW IV 2021	42
Table 8 Proyeksi Matrix LAKIP Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah 2021	44
Table 9 Tabel Perbandingan Capaian Lakip 2021 Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah...	45
Table 10 Perbandingan Capaian TW I 2021 Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah	46
Table 11 Perbandingan Capaian TW II 2021 Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah	47
Table 12 Perbandingan Capaian TW III 2021 Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah	48
Table 13 Perbandingan Capaian TW IV 2021 Asisten Deputy Infrastruktur Pengembangan Wilayah	49
Table 14 Proyeksi Matrix LAKIP 2021 Asisten Deputy Infrastruktur Konektivitas	59
Table 15 Perbandingan Capaian Lakip 2021	60
Table 16 Perbandingan Capaian TW I 2021	61
Table 17 Perbandingan Capaian TW II 2021	62
Table 18 Perbandingan Capaian TW III 2021	63
Table 19 Perbandingan Capaian TW IV 2021	64
Table 20 Proyeksi Matrix LAKIP 2021 Asisten Deputy Industri Pendukung Infrastruktur	68
Table 21 Perbandingan Capaian Lakip 2021	71
Table 22 Perbandingan Capaian TW 2021	71
Table 23 Perbandingan Capaian LAKIP 2021 Asisten Deputy Industri Maritim Dan Transportasi	78
Table 24 Perbandingan Capaian TW I 2021 Asisten Deputy Industri Maritim Dan Transportasi	79
Table 25 Perbandingan Capaian TW II 2021 Asisten Deputy Industri Maritim Dan Transportasi	80
Table 26 Perbandingan Capaian TW III 2021 Asisten Deputy Industri Maritim Dan Transportasi	81
Table 27 Tabel Perbandingan Capaian TW IV 2021 Asisten Deputy Industri Maritim Dan Transportasi	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

5 (lima) Arahannya Utama Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kemaritiman (RPJMN) Tahun 2021-2024, meliputi: 1) Pembangunan Infrastruktur, 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 3) Mendorong Investasi, 4) Reformasi Birokrasi, dan 5) Penggunaan APBN.

1) Pembangunan Infrastruktur: Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, meliputi: Kawasan Industri Kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan; **2) Pembangunan SDM:** Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi; **3) Mendorong Investasi:** Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungutan liar, dan hambatan investasi lainnya; **4) Reformasi Birokrasi:** Reformasi structural agar lembaga semakin sederhana, memiliki kecepatan melayani, dan efisiensi lembaga; serta **5) Penggunaan APBN:** Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kemaritiman dan Investasi (RPJMN) Tahun 2021-2024 ialah meningkatkan pembangunan negara kepulauan Indonesia dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional sebagai landasan menuju Indonesia pusat peradaban maritim dunia. Presiden Joko Widodo merencanakan gagasannya untuk membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia melalui 5 (lima) Prioritas Nasional pada RPJMN 2021- 2024, yakni: 1) Pembangunan Manusia, 2) Penguatan Konektivitas, 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, 4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumberdaya Air, dan 5) Stabilitas Keamanan Nasional.

Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan Pengarusutamaan Wilayah Kepulauan (kemaritiman) dalam RPJMN Tahun 2021-2024 ialah pembangunan kewilayahan menjadi basis pembangunan prioritas Nasional dan karakter kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan. 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada RPJMN 2021-2024 membentuk Kebijakan Kelautan Indonesia, yakni: 1) Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, 2) Diplomasi Maritim, 3) Budaya Bahari, 4) Pengelolaan Ruang Laut

dan Perlindungan Lingkungan Laut, 5) Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, 6) Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan, dan 7) Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan.

Tujuan untuk mewujudkan Indonesia, pusat peradaban maritim dunia, terdiri dari: 1) Tujuan ialah teguhnya jati diri Indonesia sebagai Negara Kepulauan menjadi negara maritim yang maju, kuat, dan mandiri yang dapat berperan sebagai pusat peradaban maritim dunia dan 2) sasaran yang menjadi tujuan ialah tegaknya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang berperan aktif di tingkat regional dan global (mandiri), terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan berdaya saing sebagai penggerak utama perekonomian nasional (kuat), dan menguatnya jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter, dan berbudaya nusantara (maju).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden telah mencanangkan bahwa Indonesia harus mampu meraih kembali kejayaan maritim. Langkah nyata yang telah dilakukan adalah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dalam Kabinet Kerja. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menjalankan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Secara umum, tujuan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah: **“Mensinergikan kebijakan Kementerian dan/atau Lembaga guna mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat menuju poros maritim dunia”**. Pembangunan pusat pertumbuhan baru dan penyediaan infrastruktur di berbagai Wilayah Indonesia, dengan strategi perencanaan pembangunan yang sinergi dengan tata kelola industri logistik.

Dasar didirikannya Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini dijabat oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi sehingga dapat terjadi sinergi diantara kementerian/lembaga yang dikoordinasikan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024, meliputi: visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kematriman dan investasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
- terkait dengan isu di bidang kematriman dan investasi;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kematriman dan investasi;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
- Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim.
- Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, struktur Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi, terdiri atas:

- Sekretariat Kementerian Koordinator;
- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
- Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
- Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan EKonomi;
- Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Petambangan.

1.2.TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEDEPUTIAN

Sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka tugas dan fungsinya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

A.Tugas Pokok

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidang infrastruktur dan transportasi.

B.Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan transportasi;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

Kondisi ideal dalam pencapaian visi dan misi di Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, maka dirumuskan tujuan program deputi ini adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dengan sektor teknis dalam percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, dan transportasi untuk poros maritim.

Untuk mencapai tujuan program pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, disusunlah sasaran program, yaitu: terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air; Infrastruktur Pengembangan Wilayah; Infrastruktur Konektivitas; Industri Pendukung Infrastruktur dan Industri Maritim dan Transportasi melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.

Ukuran keberhasilan atas program yang dihasilkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi sesuai tugas dan fungsinya, yakni: dihasilkannya bahan kebijakan/regulasi, rekomendasi yang dimanfaatkan, kawasan ekonomi dan industri yang terbentuk, revisi kebijakan/regulasi serta rekomendasi yang ditindaklanjuti yang semuanya sebagai hasil dari masing-masing Asisten Deputi.

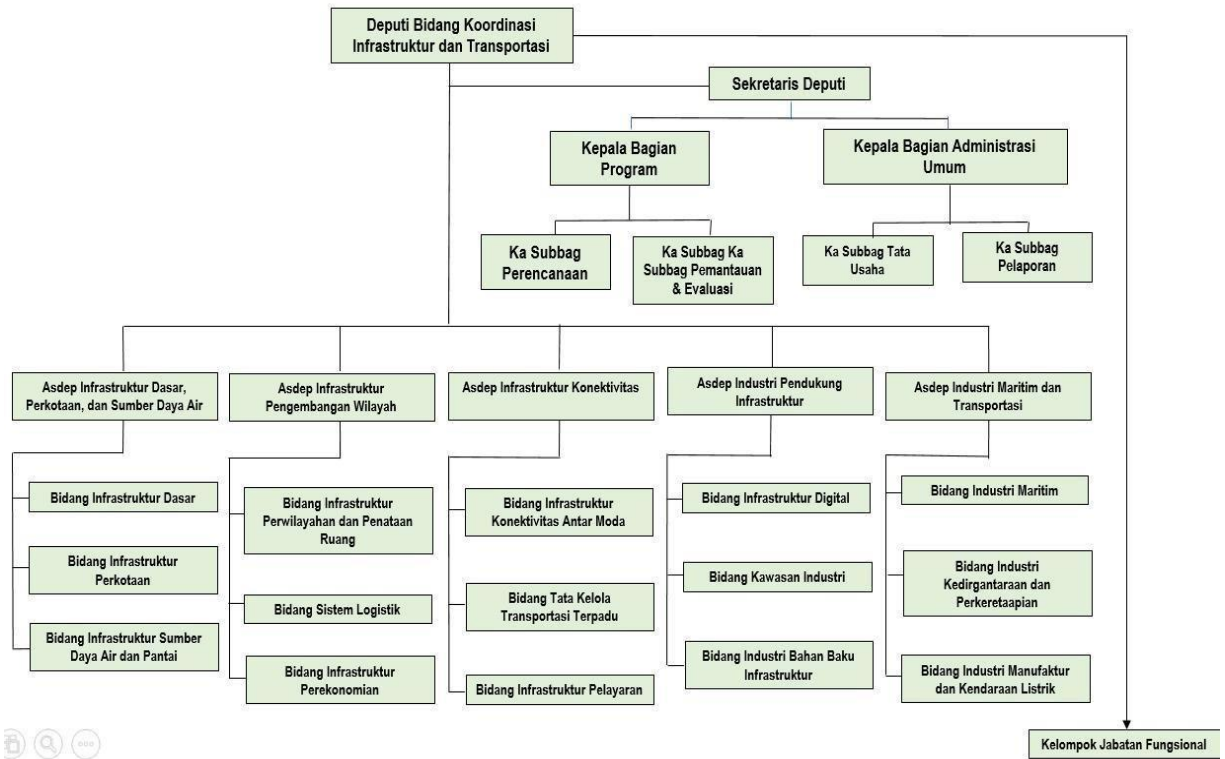
Keterkaitan antara sasaran strategis Kementerian Koordinator, tujuan program, sasaran program dan indikator kinerja unit organisasi eselon 1 (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi) diatas dapat dilihat pada tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diarahkan untuk mempercepat hal-hal, sebagai berikut:

1. Tersedianya Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air yang terintegrasinya dan terdistribusi secara seimbang;
2. Terpenuhinya Infrastruktur Pengembangan Wilayah dengan dasar strategis nasional untuk mempercepat pembangunan infrastruktur;
3. Tersedianya Infrastruktur konektivitas secara memadai, berdaya saing global, dan mempercepat pembangunan bidang transportasi;
4. Berkembangnya Industri Penunjang Infrastruktur dengan kandungan lokal tinggi dan ramah lingkungan yang mendukung kedaulatan energi;
5. Berkembangnya Industri Maritim dan Transportasi yang berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi di Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, terdiri atas:

1. Sekretariat Deputi
2. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air;
3. Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah;
4. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas;
5. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur;
6. Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi



Gambar 1 struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi untuk Tahun Anggaran 2021, maka sasaran program yang dijanjikan, yaitu: terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air; Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Infrastruktur Konektivitas; Industri Pendukung Infrastruktur; dan Industri Maritim dan Transportasi melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang efektif dan produktif.

Indikator-indikator kinerja untuk sasaran program ditinjau dari 3 (tiga) perspektif, yaitu:

1. *Customer Perspective*, berupa: a) persentase rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan b) persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang dilaksanakan para pemangku kepentingan
2. *Internal Process Perspective*, berupa: a) jumlah rumusan/formulasi Kebijakan yang dihasilkan di Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dengan target 100%; b) jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi infrastruktur dan Transportasi yang dihasilkan dengan target 100%.
3. *Learning and Growth Perspective*, berupa nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target ≥ 67 .

2.2. RENCANA DAN TARGET KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKJ) di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi merupakan laporan capaian kinerja tahun 2021 yang menggambarkan capaian kinerja untuk tahun anggaran 2021. Laporan ini merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja tingkat Kedeputian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi tahun 2021, yaitu:

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c) Sebagai bahan pengendalian pimpinan dan untuk perbaikan pada tahun berikutnya;

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit organisasi (Kedeputian/Sekretariat Kemenko) berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta ditembuskan kepada Inspektorat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sasaran program Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, yaitu: terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air, infrastruktur pengembangan wilayah, infrastruktur konektivitas, industri pendukung infrastruktur, dan industri maritime dan transportasi melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang efektif dan produktif. Adapun target dan uraian untuk masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan di bawah

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET 2021
1.	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air	88
2.	Biaya Logistik terhadap PDB	Turunnya Prosentase Biaya Logistik terhadap PDB	Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah	21,92
3.	Pengendalian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Koordinasi Tim Pokja P3DN	Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi	100%
4.	Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air	88
5.	Biaya Logistik terhadap PDB	Turunnya Prosentase Biaya Logistik terhadap PDB	Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah	21,92
6.	Presentase ketersediannya jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Kajian Penetapan Pelabuhan Utama Terpadu	Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas	100%

7.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Prioritas Nasional	Terkoordinasikannya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Prioritas Nasional	Asisten Deputi Industri PendukungInfrastruktur	4 Kawasan Industri (kumulatif)
8.	Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi	100%
9.	Presentase Rancangan Kebijakan di bidang Infrastruktur dan Transportasi	Tercapainya Presentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	Seluruh Asisten Deputi	100%
10.	Presentase rancangan rekomendasi Kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Transportasi	Tercapainya Rekomendasi Pengendalian Kebijakan yang dilaksanakan	Seluruh Asisten Deputi	100%
11.	Presentase SDM yang sesuai kompetensinya	Meningkatnya Presentase SDM yang sesuai kompetensinya	Sekretaris Deputi	60%
12.	Nilai PMPRB Deputi	Laporan PMPRB Deputi	Sekretaris Deputi	75
13.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP	Sekretaris Deputi	67
14.	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Hasil Penilaian IKPA Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Sekretaris Deputi	82

2.2.1. Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Menjadi Kebijakan Menteri Koordinator

1. Indeks Daya Saing Global: Laporan Hasil Survei dan *World Economic Forum*
2. Indeks Kinerja Logistik: Laporan Hasil Survei dan *World Economic Forum*
2. Indeks Diparsitas Ekonomi: Koordinasi dengan PUPER, ESDM, KEMENHUB, dan BKPM
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri: Data dari Kementerian Perindustrian

2.2.2. Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Dihasilkan

1. Perumusan Kebijakan Bidang Industri Pendukung Infrastruktur
2. Perumusan Kebijakan Bidang Industri Industri Maritim dan Transportasi
3. Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar. Perkotaan. dan Sumberdaya Air
4. Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas
5. Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah

2.2.3. Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Dihasilkan

1. Rekomendasi Kebijakan Industri Pendukung Infrastruktur
2. Rekomendasi Kebijakan Industri Maritim dan Transportasi
3. Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Dasar. Perkotaan. dan Sumberdaya Air
4. Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Konektivitas
5. Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA UNIT ORGANISASI

Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang direvisi per September 2021 karena adanya penghematan dan pengalihan anggaran untuk Pandemi Covid-19 yang melanda, maka secara umum rencana yang ditargetkan tersebut tercapai seluruhnya pada waktu Triwulan IV dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dalam uraian ini membahas terkait penjelasan dan rincian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan ulasan, meliputi: Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya; Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis; Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; Analisis kondisi yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja; Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya (SDM, Anggaran, dll); serta Analisa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja tahun ini.

Pengukuran Nilai Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Tahun 2021 dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran (Bulan Desember) dengan target (Rencana Kinerja) yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi.

3.1.1. Capaian pada Penyusunan Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Transportasi



Sasaran Strategis Menteri Koordinator

SS3. bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi negara dengan jatidiri yang kuat sehingga tangguh dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin mengglobal. Jati diri ini ditunjukkan dengan daya saing yang dimiliki sebagai salah satu sumber dari ketahanan negara dalam menghadapi tantangan dalam membangun peradaban bangsa. Peradaban dibangun melalui kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang unggul. Capaian SS ini diukur dengan IKU Nilai Indeks Daya Saing Global (IDSG) yang menggambarkan

kemampuan negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia. Nilai ini dikeluarkan oleh *World Bank* dan terdiri dari dua belas pilar daya saing yaitu:



Gambar 2 Pilar Daya Saing

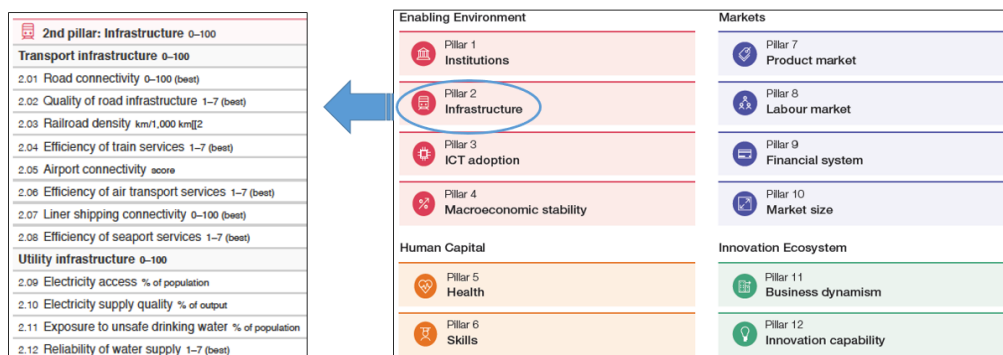
Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi



bertujuan untuk meningkatkan Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air adalah mewujudkan peningkatan pelayanan Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air meliputi Pemenuhan Infrastruktur Dasar di wilayah 3T, Infrastruktur Perkotaan dan Peningkatan Peringkat Infrastruktur Sumberdaya Air Dan Pantai. Capaian SS ini diukur dengan IKU meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air



2019 GCI-World Economic Forum (WEF)



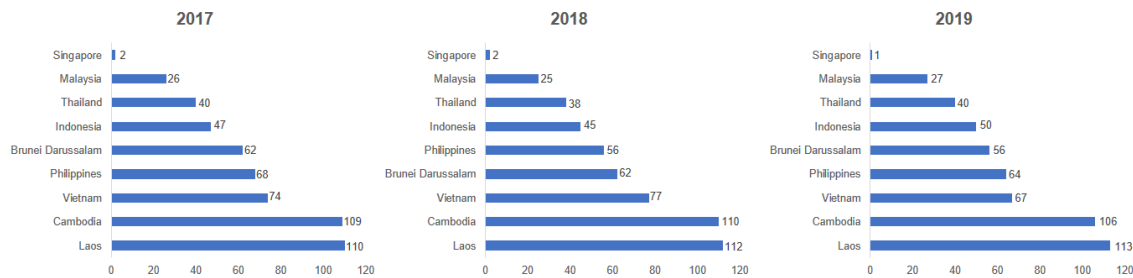
Global Competitiveness Index 4.0 framework terdiri dari 12 pilar, yang menjadi indikator penilaian indeks daya saing setiap negara. Selain itu, turunan dari pilar 2 khususnya infrastruktur terdapat 12 kriteria penilaian (*transport infrastructure* dan *utility infrastructure*)

Gambar 3 Indikator Penilaian Indeks Daya Saing Infrastruktur

Peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat pada 2019, yakni di posisi 50 dari semula di urutan 45 pada 2018. Indonesia hanya berhasil mengantongi skor 64,6 turun tipis 0,3 dari tahun lalu. Hal itu terungkap dari laporan World Economic Forum (WEF) yang bertajuk The Global Competitiveness (GCI) Report 2019. Mengutip laporan WEF, disebutkan bahwa kinerja Indonesia pada dasarnya tak banyak berubah lantaran penurunan skor GCI kecil, yaitu 0,3. WEF menyebut kekuatan utama Indonesia adalah ukuran pasarnya (peringkat 7 dengan skor 82,4) dan stabilitas makroekonomi (peringkat 54 dengan skor 90). WEF juga menyebut Indonesia memiliki budaya bisnis yang dinamis (peringkat 29 dengan skor 69,6) dan sistem keuangan yang stabil (peringkat 58 dengan skor 64,0). Dua indikator itu terpantau meningkat pada 2019. Sebagai negara berkembang, Indonesia disebut memiliki tingkat adopsi teknologi yang tinggi (peringkat 72 dengan skor 55,4). Namun, kualitas akses tetap relatif rendah. Selain itu, WEF menyebut kapasitas inovasi Indonesia masih terbatas, meski semakin meningkat (peringkat 74 dengan skor 37,7). Ada ruang yang cukup untuk perbaikan bagi Indonesia kepada batas tertinggi penilaian, antara 30 dan 40 poin.



Peringkat Indeks Daya Saing Indonesia (2017-2019)



- Peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat pada 2019, yakni di posisi 50 (dari 141 negara) dari semula di urutan 45 pada 2018. Indonesia hanya berhasil mengantongi skor 64,6 turun tipis 0,3 dari tahun lalu.
- Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki ranking keempat. Selain Singapura, Indonesia kalah dari Malaysia yang bertengger di posisi 27 dengan skor 74,6. Peringkat Malaysia turun 2 dari sebelumnya 25. Indonesia juga kalah dari Thailand yang menempati posisi ke 40 dengan skor 68,1. Peringkat Negeri Gajah Putih itu juga turun 2 level dari 38. Indonesia berhasil lebih unggul dari Filipina di posisi 64 dengan skor 61,9. Posisi Filipina turun 8 peringkat dari sebelumnya 56. Indonesia juga dinyatakan lebih berdaya saing dari Vietnam di posisi 67 dengan skor 61,5. Namun, Vietnam berhasil menaikkan posisinya sebanyak 10 peringkat dari sebelumnya 77. Laporan GCI ini berdasarkan studi dari 141 negara yang secara kumulatif menyumbang 99 persen dari PDB dunia. Terdapat 12 indikator daya saing yang digunakan WEF, meliputi: lembaga, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas makro ekonomi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan inovasi. Setiap komponen memiliki skala penilaian 0-100, dimana angka 100 mewakili kondisi paling ideal dari setiap indikator.

Gambar 4 Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia kurun waktu 2017-2019

Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki ranking keempat. Selain Singapura, Indonesia kalah dari Malaysia yang bertengger di posisi 27 dengan skor 74,6. Peringkat Malaysia turun 2 dari sebelumnya 25. Indonesia juga kalah dari Thailand yang menempati posisi ke 40 dengan skor 68,1. Peringkat Negeri Gajah Putih itu juga turun 2 level dari 38. Indonesia berhasil lebih unggul dari Filipina di posisi 64 dengan skor 61,9. Posisi Filipina turun 8 peringkat dari sebelumnya 56. Indonesia juga dinyatakan lebih berdaya saing dari Vietnam di posisi 67 dengan skor 61,5. Namun, Vietnam berhasil menaikkan posisinya sebanyak 10 peringkat dari sebelumnya 77. Laporan GCI ini berdasarkan studi dari 141 negara yang secara kumulatif menyumbang 99 persen dari PDB dunia. Terdapat 12 indikator daya saing yang digunakan WEF, meliputi: lembaga, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas makro ekonomi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan inovasi. Setiap komponen memiliki skala penilaian 0-100, dimana angka 100 mewakili kondisi paling ideal dari setiap indikator.

Infrastruktur merupakan salah satu factor dari 12 faktor yang dijadikan sebagai indicator untuk menilai indeks daya saing Indonesia. Infrastruktur merupakan fokus utama pembangunan Indonesia dari tahun 2015-2019 dan dilanjutkan pada periode selanjutnya 2020-2024, sehingga diharapkan terbangunnya infrastruktur dapat mengangkat perekonomian Indonesia, dimana infrastruktur menjadi konektivitas antar wilayah di Indonesia dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia.

Kepastian hukum menjadi hal utama dalam meningkatkan gairah investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dukungan regulasi ini antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 pada Lampiran II terdapat 42 proyek prioritas strategis (Major project). Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimana terdapat 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) dari 12 sektor pembangunan dan 10 program strategis nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, Undang-Undang ini bertujuan:

- Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Indikator infrastruktur sendiri terdiri dari transport Infrastruktur dan utility infrastruktur. Kelompok transport infrastruktur sendiri terdiri dari delapan (8) sub sector yaitu *Road connectivity*, *Quality of road infrastructure*, *Railroad density*, *Efficiency of train services*, *Airport connectivity*, *Efficiency of air transport services*, *Liner shipping connectivity* dan *Efficiency of seaport services*. Kelompok **utility infrastruktur**, terdiri dari *Electricity access % of population*, *Electricity supply quality*, *Exposure to unsafe drinking water % of population* dan

Reliability of water supply. Namun, yang digunakan sebagai indikator pengukuran infrastruktur khususnya di Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air adalah kelompok **utility infrastruktur dan road connectivity**.

Menurut laporan WEF, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada di posisi 72 pada tahun 2019 mengalami penurunan dari posisi 71 pada tahun 2018. Untuk peringkat Infrastruktur Dasar Indonesia menempati posisi 89 dari 141 Negara. Namun, pada tahun 2021 prediksi akan mengalami peningkatan peringkat infrastruktur dasar hal tersebut dikarenakan beberapa factor antara lain factor internal yaitu pandemic Covid-19 yang sudah mulai menurun di Indonesia secara umum dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Sasaran Strategis Menteri Koordinator



Tujuan dari SS.5 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menurunkan biaya pengiriman barang, memangkas disparitas harga bahan pokok antar wilayah, serta memeratakan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Hal ini dapat dilaksanakan diantaranya dengan meningkatkan konektivitas dan kinerja logistik yang akan menjamin kelancaran arus barang. Kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui strategi:

- Menurunkan biaya logistik nasional yang memperlancar arus barang dan berdampak pada pemerataan
- Menyediakan Infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah

Representasi pelaksanaan target SS.5 dilakukan melalui berbagai bidang kemaritiman dengan fokus pada penanganan program Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi serta program Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sasaran strategis 5 (SS.5) dijabarkan dengan 2 indikator kinerja, yaitu; Indeks Kinerja Logistik dan Indeks Disparitas Ekonomi.

Indeks Kinerja Logistik (*Logistic performance Index/LPI*) merupakan alat perbandingan interaktif untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja dalam logistik perdagangan. Sedangkan Indeks Disparitas Ekonomi bertujuan untuk mengukur pemerataan

pembangunan ekonomi serta untuk memberi gambaran tentang pembangunan Infrastruktur dan Investasi maritim di Kawasan Jawa dan Kawasan Luar Jawa. Capaian tahun 2020 indeks disparitas ekonomi -0.176 direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaran PDRB ini dinilai dapat menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah yang diukur melalui nilai tambah ekonomi yang dihasilkan.

Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi



SS ini bertujuan untuk mengukur penurunan biaya logistik terhadap PDB yang menjadi salah satu indikator pembangunan. Penurunan biaya logistik nasional adalah mewujudkan pengembangan wilayah dan timbulnya pusat perekonomian baru. Pemenuhan infrastruktur Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Infrastruktur Perwilayahan dan Penataan Ruang yang menciptakan pengembangan daerah baru, Sistem logistik yang mendukung disparitas harga, dan mewujudkan infrastruktur perekonomian di daerah yang belum berkembang. Capaian SS ini diukur dengan IKU turunnya biaya logistik terhadap PDB. Serta bertujuan untuk mewujudkan sistem konektivitas terpadu. Sistem konektivitas yang terpadu dimaksud sebagai sebuah jaringan yang berkesinambungan dan antar tiap infrastruktur konektivitas memiliki peran dan fungsi masing-masing, baik pelabuhan, stasiun, terminal, maupun bandara. Jaringan pelabuhan utama terpadu menjadi isu perwujudan sistem konektivitas dalam *major project* Nasional Tahun 2020-2024 (sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024). Proses pencapaian sistem konektivitas yang terpadu dilaksanakan dalam koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan pengendalian yang dilakukan bersama-sama dengan K/L terkait. Capaian SS ini diukur dengan IKU Presentase ketersediaannya jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.

Indeks Disparitas Ekonomi

Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali merilis data capaian realisasi investasi pada Triwulan III (periode Juli – September) untuk Tahun 2021, berhasil mencatat realisasi investasi triwulan III tahun 2021 belum di release oleh BKPM

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
		TARGET	REALISASI
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya realisasi penanaman modal			
1	Nilai realisasi penanaman modal (rupiah triliun)*	858,5	442,8
2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (rupiah triliun)*	268,7	167,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (persentase)*	49,0	51,5
4	Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM (persentase)*	49,7	48,4
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal			
5	Peringkat Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) (Peringkat EoDB)	56	Dihentikan World Bank
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani			
6	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM (Predikat/Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (77,89)
7	Opini atas Laporan Keuangan BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP

Keterangan: *) Data capaian Triwulan III masih menunggu *press release*



Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pertumbuhan positif ini menggambarkan bangkitnya perekonomian nasional, terutama dari sektor investasi. Hal ini tentunya juga merupakan dampak

positif dari implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah pada November 2020 lalu.

Pemerintah akan terus berkomitmen mewujudkan investasi yang berkualitas, melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan III tahun 2021 sebesar Rp 216,7 Triliun, naik 3.7% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (209,0 T) kenaikan 10,3% pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun ini dibandingkan tahun lalu. PMDN juga mendominasi 52,4% (Rp 113,5 T) dibanding penanaman modal Asing (PMA) 47,6% (RP 103,2 T)

Sasaran Strategis Menteri Koordinator



Tujuan dari SS.7 adalah peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional yang dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah dibidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu, keempat sektor dimaksud yaitu: Kehutanan dan Penebangan Kayu; Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta Pariwisata. SS.7 memiliki 2 IKU yaitu PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa dan Tingkat Komponen dalam Negeri.

Tingkat Komponen dalam Negeri

Tujuan dari IKU ini yaitu untuk mengetahui berapa persen TKDN dari produk-produk yang dihasilkan melalui pengembangan produk logam, mesin, elektronika, dan alat angkut dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri berupa barang dan jasa akan membangkitkan industri nasional dan akan menarik banyak investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam jangka panjang hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam negeri dan membentuk kemandirian dalam berusaha untuk peningkatan ekonomi.

Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi



ini bertujuan untuk meningkatkan Meningkatkan Industri Maritim dan Transportasi adalah mewujudkan Industri Maritim dan Transportasi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan basis industri manufaktur dan pengembangan produk melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Capaian SS ini diukur dengan IKU Pemantauan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Table 1 Capaian Kinerja Deputi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	CAPAIAN
Perspektif Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Perspective</i>)					
SS.1	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	1	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur Dasar	88	89
SS.2	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	2	Biaya Logistik terhadap PDB	21,92	21,92
SS.3	Meningkatnya Kemandirian Industri Penunjang Infrastruktur, Maritim, dan Transportasi	3	Presentase Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	100%	100%

Perspektif Pengguna (<i>Customer Perspective</i>)					
SS.4	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	4	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	88	89
SS.5	Menurunnya Biaya Logistik Nasional	5	Biaya Logistik terhadap PDB	21,92	21,92
SS.6	Terwujudnya sistem konektivitas yang terpadu	6	Presentase ketersediannya jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	100%	100%
SS.7	Meningkatnya Produktifitas Industri Penunjang Infrastruktur	7	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Prioritas Nasional	4 Kawasan Industri (kumulatif)	4 Kawasan Industri (kumulatif)
SS.8	Meningkatnya Industri Maritim dan Industri Transportasi	8	Presentase Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	100%	100%
Perspektif Proses Internal Bisnis (<i>Internal Business Perspective</i>)					
SS.9	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Efektif dan Efisien	9	Presentase Rancangan Kebijakan di bidang koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang ditindaklanjuti	100%	100%

SS.10	Efektifitas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang infrastruktur dan transportasi yang efektif dan efisien	10	Presentase rancangan rekomendasi Kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang ditindaklanjuti	100%	100%
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan (<i>Learning & Growth Perspective</i>)					
SS.11	Tersedianya SDM yang kompeten	11	Presentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang Sesuai Kompetensi	60%	60%
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif	12	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	67	69,72
		13	Presentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	75	86

SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	82	
-------	--	----	---	----	--

3.1.2. Capaian Kinerja Unit ES 2 beserta Jumlah Rancangan Kebijakan , Bidang Infrastruktur dan Transportasi yang Dihasilkan

ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR DASAR, PERKOTAAN DAN SUMBER DAYA AIR

SS.1

Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air

SS.1. SS ini bertujuan untuk meningkatkan Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air adalah mewujudkan peningkatan pelayanan Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air meliputi Pemenuhan Infrastruktur Dasar di wilayah 3T, Infrastruktur Perkotaan dan Peningkatan Peringkat Infrastruktur Sumberdaya Air Dan Pantai. Capaian SS ini diukur dengan IKU meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air

Peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat pada 2019, yakni di posisi 50 dari semula di urutan 45 pada 2018. Indonesia hanya berhasil mengantongi skor 64,6 turun tipis 0,3 dari tahun lalu. Hal itu terungkap dari laporan World Economic Forum (WEF) yang bertajuk The Global Competitiveness (GCI) Report 2019. Mengutip laporan WEF, disebutkan bahwa kinerja Indonesia pada dasarnya tak banyak berubah lantaran penurunan skor GCI kecil, yaitu 0,3. WEF menyebut kekuatan utama Indonesia adalah ukuran pasarnya (peringkat 7 dengan skor 82,4) dan stabilitas makroekonomi (peringkat 54 dengan skor 90). WEF juga menyebut Indonesia memiliki budaya bisnis yang dinamis (peringkat 29 dengan skor 69,6) dan sistem keuangan yang stabil (peringkat 58 dengan skor 64,0). Dua indikator itu terpantau meningkat pada 2019.

Sebagai negara berkembang, Indonesia disebut memiliki tingkat adopsi teknologi yang tinggi (peringkat 72 dengan skor 55,4). Namun, kualitas akses tetap relatif rendah. Selain itu, WEF menyebut kapasitas inovasi Indonesia masih terbatas, meski semakin meningkat (peringkat 74 dengan skor 37,7). Ada ruang yang cukup untuk perbaikan bagi Indonesia kepada batas tertinggi penilaian, antara 30 dan 40 poin.

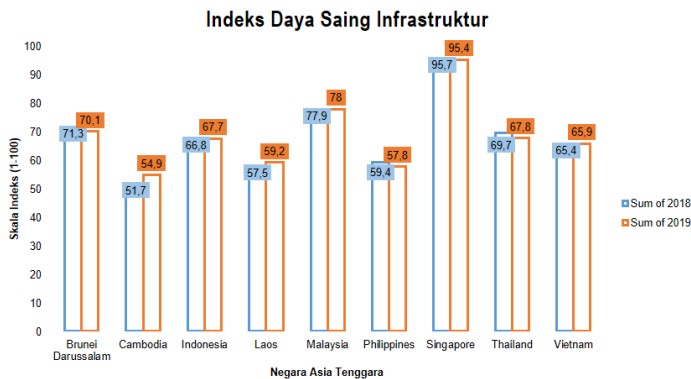


Gambar 5 Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia kurun waktu 2017-2019

Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki ranking keempat. Selain Singapura, Indonesia kalah dari Malaysia yang bertengger di posisi 27 dengan skor 74,6. Peringkat Malaysia turun 2 dari sebelumnya 25. Indonesia juga kalah dari Thailand yang menempati posisi ke 40 dengan skor 68,1. Peringkat Negeri Gajah Putih itu juga turun 2 level dari 38. Indonesia berhasil lebih unggul dari Filipina di posisi 64 dengan skor 61,9. Posisi Filipina turun 8 peringkat dari sebelumnya 56. Indonesia juga dinyatakan lebih berdaya saing dari Vietnam di posisi 67 dengan skor 61,5. Namun, Vietnam berhasil menaikkan posisinya sebanyak 10 peringkat dari sebelumnya 77. Laporan GCI ini berdasarkan studi dari 141 negara yang secara kumulatif menyumbang 99 persen dari PDB dunia. Terdapat 12 indikator daya saing yang digunakan WEF, meliputi: lembaga, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas makro ekonomi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan inovasi. Setiap komponen memiliki skala penilaian 0-100, dimana angka 100 mewakili kondisi paling ideal dari setiap indikator.



Indeks Infrastruktur Indonesia diantara Negara ASEAN



- Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi melalui IKU Deputi menargetkan indeks daya saing infrastruktur berada di angka **79,6** namun berdasarkan data dari WEF 2019 indeks daya saing infrastruktur hanya mencapai **67,7** sehingga target tahunan tidak tercapai. Hasil rilis nilai indeks daya saing dikeluarkan oleh WEF pada triwulan III tahun berjalan untuk penilaian tahun sebelumnya.
- Tidak tercapainya target dikarenakan **faktor internal**: kondisi Indonesia yang belum ramah investasi disebabkan regulasi dan birokrasi pemerintah yang terlalu rumit. **Faktor eksternal**: negara-negara saingan Indonesia semakin agresif menawarkan kemudahan untuk berinvestasi.

Gambar 6 Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia diantara Negara ASEAN

Infrastruktur merupakan salah satu factor dari 12 faktor yang dijadikan sebagai indicator untuk menilai indeks daya saing Indonesia. Infrastruktur merupakan fokus utama pembangunan Indonesia dari tahun 2015-2019 dan dilanjutkan pada periode selanjutnya 2020-2024, sehingga diharapkan terbangunnya infrastruktur dapat mengangkat perekonomian Indonesia, dimana infrastruktur menjadi konektivitas antar wilayah di Indonesia dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia.

Kepastian hukum menjadi hal utama dalam meningkatkan gairah investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dukungan regulasi ini antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 pada Lampiran II terdapat 42 proyek prioritas strategis (Major project). Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimana terdapat 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) dari 12 sektor pembangunan dan 10 program strategis nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, Undang-Undang ini bertujuan:

- Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai

- upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
 - Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Indikator infrastruktur sendiri terdiri dari transport Infrastruktur dan utility infrastruktur. Kelompok transport infrastruktur sendiri terdiri dari delapan (8) sub sector yaitu *Road connectivity, Quality of road infrastructure, Railroad density, Efficiency of train services, Airport connectivity, Efficiency of air transport services, Liner shipping connectivity dan Efficiency of seaport services*. Kelompok **utility infrastruktur**, terdiri dari *Electricity access % of population, Electricity supply quality, Exposure to unsafe drinking water % of population dan Reliability of water supply*. Namun, yang digunakan sebagai indicator pengukuran infrastruktur khususnya di Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air adalah kelompok **utility infrastruktur dan road connectivity**.

Menurut laporan WEF, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada di posisi 72 pada tahun 2019 mengalami penurunan dari posisi 71 pada tahun 2018. Untuk peringkat Infrastruktur Dasar Indonesia menempati posisi 89 dari 141 Negara. Namun, pada tahun 2021 prediksi akan mengalami peningkatan peringkat infrastruktur dasar hal tersebut dikarenakan beberapa factor antara lain factor internal yaitu pandemic Covid-19 yang sudah mulai menurun di Indonesia secara umum dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

SS.2

Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar di Wilayah 3T

SS.2. Ini bertujuan untuk Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengendalian kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar. Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar di wilayah 3T adalah pemenuhan terkait Infrastruktur Perumahan dan Permukiman, Percepatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dan Rehabilitasi Infrastruktur Pasca Bencana. Capaian SS ini diukur dengan IKU jumlah daerah 3T dan pasca bencana yang dikoordinasikan pemenuhan infrastruktur dasarnya (Lampiran II).

Ada dua isu utama dalam koordinasi percepatan infrastruktur jalan dan jembatan yaitu pembangunan jalan trans pada 18 Pulau tertinggal, terluar dan terdepan yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan dukungan regulasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Delivery Assurance Unit (DAU) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024.

Pulau Enggano merupakan salah satu dari 111 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang masih butuh perhatian, paling utama adalah ketersediaan infrastruktur seperti Jalan dan Jembatan, jaringan internet serta infrastruktur dasar lainnya. Pasalnya, Infrastruktur yang tidak memadai sangat menghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat di Pulau Enggano. Secara umum, Aksesibilitas dari dan menuju Pulau Enggano dapat ditempuh melalui perjalanan udara dan perjalanan laut. Untuk jalur udara menggunakan maskapai penerbangan perintis Susi Air yang beroperasi dua kali seminggu. Pesawat perintis ini memiliki kapasitas 12 penumpang dengan waktu tempuh 40 menit dari Bandara Udara Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu menuju Bandar Udara Enggano. Sedangkan jalur laut menggunakan kapal perintis dan kapal fery pengangkut barang dan penumpang.

Pulau Enggano memiliki ruas jalan utama yaitu ruas jalan Banjar Sari – Malakoni – Kahyapu yang menghubungkan dua Pelabuhan utama (Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Kayu Apuh) di Pulau Enggano. Ruas jalan ini memiliki Panjang 32 Km berdasarkan SK Jalan tahun 2019. Fungsi utama dari ruas jalan ini adalah akses untuk angkutan hasil perkebunan (pisang) dan lalu lintas umum. Ruas jalan utama ini terbagi

ke dalam empat sektor. Sektor 1 dengan Panjang 10,4 Km, sektor 2 memiliki Panjang 8 Km, sektor 3 dengan Panjang 9,7 Km dan sektor 4 dengan Panjang 3,9 Km.

Adapun pelaksanaan pencapaian kinerja SS.2 dilakukan melalui Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan jalan Trans 3T antara lain dengan melaksanakan Rakor Tingkat Menteri, ND Laporan Kunjungan Lapangan Deputi kepada Menko Marves, Surat Deputi kepada Dirjen BM dan PUPR. Kendala saat ini adalah dari 18 Pulau 3T, 15 Pulau berstatus Jalan Nasional sedangkan **3 pulau belum berstatus Jalan Nasional (P. Enggano, P. Kei Besar dan Kep. Mentawai)**, artinya lokasi yang tidak berstatus jalan Nasional tiap tahunnya tidak mendapatkan perhatian untuk dilakukan preservasi/ perbaikan. Sehingga Tahun 2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 pelaksanaan kegiatan difokuskan pada 3 lokasi yang belum berstatus jalan Nasional agar segera teralokasi anggaran untuk pembangunannya. Pencapaian Kinerja SS.2 dimana Pulau Enggano sudah mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunannya di Tahun Anggaran 2022 oleh Kementerian PUPR melalui Balai Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu.

SS.3

Tersedianya Infrastruktur Perkotaan

SS.3. Ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengendalian kebijakan di Infrastruktur dan aksesibilitas perkotaan. Tersedianya Infrastruktur Perkotaan adalah penyiapan bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Infrastruktur Air Minum, Infrastruktur Jaringan Listrik dan Gas Perkotaan, Percepatan Infrastruktur Jalan Tol dan Jalan Nasional dan Pembiayaan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan. Capaian SS ini diukur dengan IKU jumlah daerah yang tersedia infrastruktur dan aksesibilitas perkotaan (Lampiran III).

SS.4

Terwujudnya Peningkatan Peringkat Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai

SS.4. Ini bertujuan Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengendalian kebijakan di Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai. Terwujudnya Peningkatan Peringkat Infrastruktur Sumberdaya Air Dan Pantai adalah peningkatan Peringkat Infrastruktur Sumberdaya Air Dan Pantai melalui pembuatan bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Infrastruktur Jaringan Sumberdaya Air, Percepatan Infrastruktur Waduk

Multipurpose, Infrastruktur Rekayasa Pantai dan Pembiayaan Infrastruktur Sumberdaya Air. Capaian SS ini diukur dengan IKU Jumlah daerah yang dikoordinasikan peningkatan kualitas air dan pesisir pantainya.

Adapun capaian kinerja SS.4 peningkatan peringkat infrastruktur sumber daya air dan pantai dilaksanakan melalui (Lampiran IV):

- Penetapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN/ NCICD);
- Terlaksananya Fasilitasi Pokja Kajian Teknis dan Dukungan Infrastruktur Peringatan Dini Kebencanaan di Wilayah Pesisir Indonesia yang memiliki Risiko Tsunami dan Banjir - Koordinasi dan kolaborasi implementasi teknologi PUMMA (Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut) untuk pemulihan pasca bencana Tahun 2021;
- Pelaksanaan fasilitasi Kelompok Kerja Percepatan PSN Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing Prov. DKI Jakarta – Jawa Barat Tahun 2021;
- Rekomendasi Kebijakan Perspektif SDA untuk Pembangunan Calon Ibukota Negara – DSDAN
- Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk – DSDAN;
- Rekomendasi kebijakan keperluan Re-evaluasi kelayakan pembangunan Inland Waterway CBL sebagai bagian dari PSN;
- Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pokja Kajian Teknis Pendahuluan untuk Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Bengkulu dan ditetapkannya KepMen KP 109 Tahun 2021 tentang RIPPN;
- Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: B-2299/MENKO/MARVES/IS.03.00/VI/2021 tentang Percepatan Pembaruan Penlok Pengadaan Tanah Pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

SS.5

Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air

SS.5. Ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengendalian suatu kebijakan bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air. Efektifitas rumusan kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air adalah terselesainya formulasi pengendalian kebijakan bidang Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Capaian SS ini diukur dengan IKU presentase rumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan.

Secara umum efektivitas rumusan kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air lebih dari 100% sesuai dengan target TA 2021. Hal ini tergambar dari capaian rumusan kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar 2 (dua) rekomendasi kebijakan, Bidang Infrastruktur Perkotaan 2 (dua) rekomendasi kebijakan dan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai 2 (dua) rekomendasi kebijakan namun melebihi target dengan 3 (tiga) rekomendasi kebijakan dan 1 (satu) kebijakan.

MATRIKS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ASDEP IDPSDA

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2021 adalah sumber daya anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan. Dukungan melalui pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bersama dengan mitra-mitra K/L terkait yang dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta mitra dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas *Delivery Assurance Unit (DAU)* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2021 adalah terjadinya pandemic Covid-19 dalam hal pembatasan-pembatasan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dan adanya refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta keterbatasan sumber daya yang ada (SDM).

Beberapa upaya (inovasi) yang dilakukan Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air untuk meningkatkan Presentase rekomendasi pengendalian kebijakan bidang infrastruktur dasar, perkotaan dan sumber daya air melalui:

- Penetapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN/ NCICD);
- Terlaksananya Fasilitasi Pokja Kajian Teknis dan Dukungan Infrastruktur Peringatan Dini Kebencanaan di Wilayah Pesisir Indonesia yang memiliki Risiko Tsunami dan Banjir - Koordinasi dan kolaborasi implementasi teknologi PUMMA (Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut) untuk pemulihan pasca bencana Tahun 2021;
- Pelaksanaan fasilitasi Kelompok Kerja Percepatan PSN Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing Prov. DKI Jakarta – Jawa Barat Tahun 2021;
- Rekomendasi Kebijakan Perspektif SDA untuk Pembangunan Calon Ibukota Negara – DSDAN
- Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk – DSDAN;
- Rekomendasi kebijakan keperluan Re-evaluasi kelayakan pembangunan Inland Waterway CBL sebagai bagian dari PSN;
- Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pokja Kajian Teknis Pendahuluan untuk Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Bengkulu dan ditetapkannya KepMen KP 109 Tahun 2021 tentang RIPPN;
- Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: B-2299/MENKO/MARVES/IS.03.00/VI/2021 tentang Percepatan Pembaruan Penlok Pengadaan Tanah Pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- Surat Deputi terkait usulan penyiapan dokumen pendukung pembangunan *feeder* tol Dharmasraya;
- Nota Dinas Deputi Infrastruktur kepada Menko Marves terkait Laporan Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung (Bagian dari JTTS) dan Pembangunan Jalan Trans Pulau 3T di Pulau Enggano.

Table 2 Proyeksi Matriks LAKIP TA 2021 Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan Dan Sumber Daya Air

NO	SASARAN KEGIATAN		IKU	TARGET 2021	CAPAIAN %	Anggaran	
						Pagu	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective)							
SS.1	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air	1	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	78	89		
Perspektif Pengguna (Customer Perspective)							
SS.2	Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar di Wilayah 3T	2	Jumlah Daerah 3T dan Pasca Bencana yang Dikoordinasikan Pemenuhan Infrastruktur Dasarnya	2	100	Rp 550.226.000,-	
SS.3	Tersedianya Infrastruktur Perkotaan	3	Jumlah Daerah Yang Tersedia Infrastruktur dan Aksesibilitas Perkotaan	2	100	Rp 550.226.000,-	
SS.4	Terwujudnya Peningkatan Peringkat Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai	4	Jumlah Daerah yang Dikoordinasikan Peningkatan Kualitas Air dan Pesisir Pantainya	2	100	Rp 1.160.554.000,-	
Perspektif Proses Internal Bisnis (Internal Business Perspective)							

NO	SASARAN KEGIATAN		IKU	TARGET 2021	CAPAIAN %	Anggaran	
						Pagu	Realisasi
SS.5	Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air	5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	100	Rp 2.261.006.000,-	

Table 3 Tabel Perbandingan Capaian 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Target 2021
		2020	2021	
1	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	67	89	78
2	Jumlah Daerah 3T dan Pasca Bencana yang Dikoordinasikan Pemenuhan Infrastruktur Dasarnya	75%	75%	2
3	Jumlah Daerah Yang Tersedia Infrastruktur dan Aksesibilitas Perkotaan	100%	100%	2
4	Jumlah Daerah yang Dikoordinasikan Peningkatan Kualitas Air dan Pesisir Pantainya	100%	100%	2
5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	100%	100

Table 4 Tabel Perbandingan Capaian TW I 2021

No	IKU	Target 2021	Capaian TW I 2020	Capaian TW I 2021	Progress Capaian
1	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	78	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
2	Jumlah Daerah 3T dan Pasca Bencana yang Dikoordinasikan Pemenuhan Infrastruktur Dasarnya	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
3	Jumlah Daerah Yang Tersedia Infrastruktur dan Aksesibilitas Perkotaan	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
4	Jumlah Daerah yang Dikoordinasikan Peningkatan Kualitas Air dan Pesisir Pantainya	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%

Table 5 Tabel Perbandingan Capaian TW II 2021

No	IKU	Target 2021	Capaian TW II 2020	Capaian TW II 2021	Progress Capaian
1	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	78	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
2	Jumlah Daerah 3T dan Pasca Bencana yang Dikoordinasikan Pemenuhan Infrastruktur Dasarnya	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
3	Jumlah Daerah Yang Tersedia Infrastruktur dan Aksesibilitas Perkotaan	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
4	Jumlah Daerah yang Dikoordinasikan Peningkatan Kualitas Air dan Pesisir Pantainya	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%

Table 6 Tabel Perbandingan Capaian TW III 2021

No	IKU	Target 2021	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Progress Capaian
1	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	78	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
2	Jumlah Daerah 3T dan Pasca Bencana yang Dikoordinasikan Pemenuhan Infrastruktur Dasarnya	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
3	Jumlah Daerah Yang Tersedia Infrastruktur dan Aksesibilitas Perkotaan	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
4	Jumlah Daerah yang Dikoordinasikan Peningkatan Kualitas Air dan Pesisir Pantainya	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%

Table 7 Perbandingan Capaian TW IV 2021

No	IKU	Target 2021	Realisasi TW IV 2020	Realisasi TW IV 2021	Progress Capaian
1	Meningkatnya Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur	78	67%		
2	Jumlah Daerah 3T dan Pasca Bencana yang Dikoordinasikan Pemenuhan Infrastruktur Dasarnya	2	75%		
3	Jumlah Daerah Yang Tersedia Infrastruktur dan Aksesibilitas Perkotaan	2	100%		
4	Jumlah Daerah yang Dikoordinasikan Peningkatan Kualitas Air dan Pesisir Pantainya	2	100%		
5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	100%		

ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH

Penjelasan capaian IKU untuk setiap SS diuraikan sebagai berikut:

SS.1

Menurunnya Biaya Logistik Nasional

SS.1. SS ini bertujuan untuk mengukur penurunan biaya logistik terhadap PDB yang menjadi salah satu indikator pembangunan. Penurunan biaya logistik nasional adalah mewujudkan pengembangan wilayah dan timbulnya pusat perekonomian baru. Pemenuhan infrastruktur Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Infrastruktur Perwilayahan dan Penataan Ruang yang menciptakan pengembangan daerah baru,

Sistem logistik yang mendukung disparitas harga, dan mewujudkan infrastruktur perekonomian di daerah yang belum berkembang. Capaian SS ini diukur dengan IKU turunya biaya logistik terhadap PDB.

SS.2

Terwujudnya Infrastruktur Perwilayahaan dan Penataan Ruang yang mendukung Pengembangan Daerah Baru

SS.2. Ini bertujuan untuk Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengendalian kebijakan di Bidang Perwilayahan dan Penataan Ruang yang mendukung pengembangan daerah baru. Terwujudnya Infrastruktur Perwilayahan dan Penataan Ruang yang Mendukung Pengembangan Daerah Baru adalah meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi yang secara potensial memiliki efek ganda (multiplier effect) yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial (lintas wilayah) dan lintas pelaku.

SS.3

Tersedianya Sistem Logistik yang dapat mendukung Penurunan Disparitas Harga

SS.3. Ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem logistik yang mendukung penurunan disparitas harga. Terwujudnya sistem logistik yang mendukung penurunan disparitas harga adalah penyiapan bahan kebijakan Kebijakan Penunjang Efektivitas Sistem Logistik Nasional dan/atau Kebijakan Program Tol Laut Sebagai Pendukung Pemerataan Logistik Nasional. Capaian SS ini diukur dengan IKU jumlah piranti kebijakan yang dikoordinasikan dan ditetapkan.

SS4

Terwujudnya Infrastruktur Perekonomian di daerah belum berkembang

SS.4. Ini bertujuan Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengendalian kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian. Terwujudnya Infrastruktur Perekonomian didaerah belum berkembang adalah terwujudnya Infrastruktur Perekonomian didaerah belum berkembang melalui pembuatan bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Infrastruktur penunjang ekonomi Kawasan terdampak bencana dan tertinggal,

Infrastruktur utama peningkatan perekonomian wilayah. Capaian SS ini diukur dengan IKU Jumlah daerah belum berkembang yang dikoordinasikan pemenuhan infrastruktur ekonominya.

SS.5

Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah

SS.5. Ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengendalian suatu kebijakan bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah. Efektifitas rumusan kebijakan di Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah adalah terselesaikannya kebijakan/pengendalian kebijakan Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Capaian SS ini diukur dengan IKU presentase rumusan kebijakan di bidang infrastruktur pengembangan wilayah yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan.

Table 8 Proyeksi Matrix LAKIP Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET 2021	CAPAIAN %	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	
Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective)							
SS.1	Menurunnya Biaya Logistik Nasional	1	Turunnya Biaya Logistik terhadap PDB	21,92		Rp. 1.810.535.000,-	
Perspektif Pengguna (Customer Perspective)							
SS.2	Terwujudnya Infrastruktur Perwilayahaan dan Penataan Ruang yang mendukung Pengembangan daerah baru	2	Jumlah Daerah Baru yang dikoordinasikan pengembangannya	4	100	Rp. 395.762.000,-	
SS.3	Terwujudnya Sistem Logistik yang Dapat	3	Jumlah Piranti Kebijakan yang	2	100	Rp. 521.236.000,-	

	Mendukung Penurunan Disparitas Harga		dikoordinasikan dan ditetapkan				
SS.4	Terwujudnya Infrastruktur Perekonomian di daerah belum berkembang	4	Jumlah Daerah Belum Berkembang yang dikoordinasikan pemenuhan infrastruktur perekonomiannya	4	100	Rp. 893.537.000,-	
Perspektif Proses Internal Bisnis (Internal Business Perspective)							
SS.5	Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah	5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	100	Rp 1.810.535.000,-	

Table 9 Tabel Perbandingan Capaian Lakip 2021 Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Target 2021
		2020	2021	
1	Turunnya Biaya Logistik terhadap PDB	22,56	21,92	21,92
2	Jumlah Daerah Baru yang dikoordinasikan pengembangannya	2	4	4
3	Jumlah Piranti Kebijakan yang dikoordinasikan dan ditetapkan	2	2	2
4	Jumlah Daerah Belum Berkembang yang dikoordinasikan	2	4	4

	pemenuhan infrastruktur perekonomiannya			
5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	100%	100%

Table 10 Perbandingan Capaian TW I 2021 Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah

No	IKU	Target 2021	Capaian TW I 2020	Capaian TW I 2021	Progress Capaian
1	Turunnya Biaya Logistik terhadap PDB	21,92	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
2	Jumlah Daerah Baru yang dikoordinasikan pengembangannya	4	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
3	Jumlah Piranti Kebijakan yang dikoordinasikan dan ditetapkan	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
4	Jumlah Daerah Belum Berkembang yang dikoordinasikan pemenuhan infrastruktur perekonomiannya	4	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%

5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
---	--	------	--	--	-----

Table 11 Perbandingan Capaian TW II 2021 Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah

No	IKU	Target 2021	Capaian TW II 2020	Capaian TW II 2021	Progress Capaian
1	Turunnya Biaya Logistik terhadap PDB	21,92	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
2	Jumlah Daerah Baru yang dikoordinasikan pengembangannya	4	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
3	Jumlah Piranti Kebijakan yang dikoordinasikan dan ditetapkan	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
4	Jumlah Daerah Belum Berkembang yang dikoordinasikan pemenuhan infrastruktur perekonomiannya	4	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK	N/A (Dikarenakan	50%

	Infrastruktur Pengembangan Wilayah yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan		jadwal keluaran kinerja TW IV)	berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
--	---	--	--------------------------------	---	--

Table 12 Perbandingan Capaian TW III 2021 Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah

No	IKU	Target 2021	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Progress Capaian
1	Turunnya Biaya Logistik terhadap PDB	21,92	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
2	Jumlah Daerah Baru yang dikoordinasikan pengembangannya	4	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
3	Jumlah Piranti Kebijakan yang dikoordinasikan dan ditetapkan	2	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
4	Jumlah Daerah Belum Berkembang yang dikoordinasikan pemenuhan infrastruktur perekonomiannya	4	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK	75%

	yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan		jadwal keluaran kinerja TW IV)	jadwal keluaran kinerja TW IV)	
--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--

Table 13 Perbandingan Capaian TW IV 2021 Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah

No	IKU	Target 2021	Realisasi TW IV 2020	Realisasi TW IV 2021	Progress Capaian
1	Turunnya Biaya Logistik terhadap PDB	21,92	100%	100%	100%
2	Jumlah Daerah Baru yang dikoordinasikan pengembangannya	4	100%	100%	100%
3	Jumlah Piranti Kebijakan yang dikoordinasikan dan ditetapkan	2	100%	100%	100%
4	Jumlah Daerah Belum Berkembang yang dikoordinasikan pemenuhan infrastruktur perekonomiannya	4	100%	100%	100%
5	Presentase Rumusan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah yang Dijadikan Sebagai Rancangan Kebijakan	100%	100%	100%	100%

- **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai IKU dimaksud sampai dengan triwulan IV tahun 2021**

Pendukung : Dukungan Ratas dan Rakor Tingkat Menteri terkait Pengembangan Wilayah

Penghambat : Pembatasan mobilitas akibat PPKM (Pandemi Covid-19) , Terjadinya tumpang tindih kewenangan antar unit kerja, Ego sektoral K/L/Pemda terkait

- **Beberapa upaya (inovasi) yang dilakukan Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah untuk meningkatkan Presentase rekomendasi pengendalian kebijakan bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah diantaranya:**

1. Melakukan pembahasan kebijakan Perpres secara vertikal dan horizontal serta bersinergi dan berkolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak penyusunan Rencana Aksi Perpres
2. Melakukan Monev sebelum kebijakan ditetapkan dengan melaksanakan kunjungan lapangan secara langsung ke lokasi proyek prioritas

- **Success story atas capaian IKU sampai dengan TW IV:**

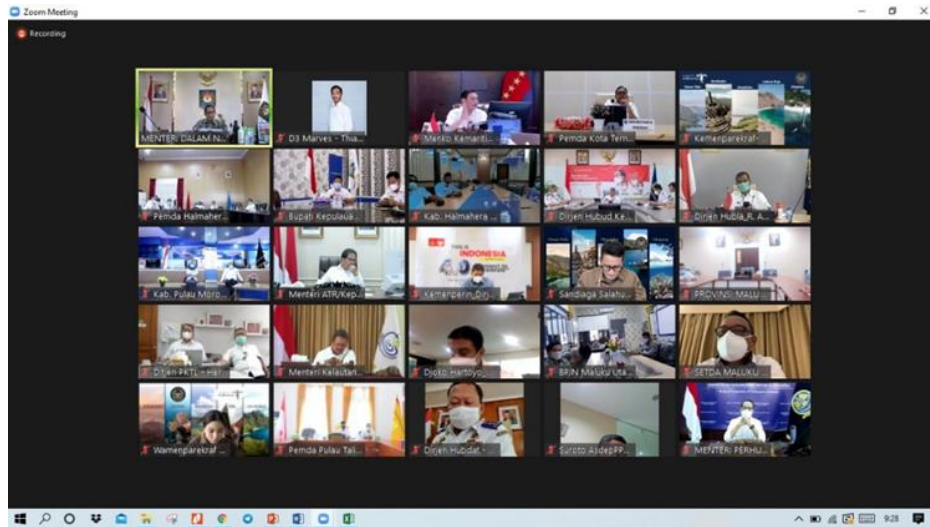
1. Terelesaikannya Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Perpres ini disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan hanya dalam waktu 5 bulan saja tanpa harmonisasi Kemenkumham karena dukungan pada Ratas Presiden serta Rapat tingkat menteri tentang Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infratsruktur Provinsi Jawa Barat
2. Revisi Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2021 telah selesai pada Bulan Mei 2021 dan Draft Kepmenko Gugus Tugas Pengawasan Tol Laut sudah disusun
3. Dukungan terkait percepatan pengembangan Kota Baru Sofifi sesuai fungsinya sebagai ibukota Provinsi Maluku menurut amanat Undang - Undang Nomor 46 tahun 1999.

- Dokumentasi Kegiatan s.d TW IV



Gambar 7 Infrastruktur Perwilayahan dan Penataan Ruang





Gambar 8 Sistem Logistik Mendukung Penurunan Disparitas Harga





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN
BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR,
DAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menurunkan disparitas harga barang dalam rangka menjamin ketersediaan barang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan guna mendukung konektivitas logistik antarmoda transportasi, perlu mengatur kembali penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk




Gambar 9 Infrastruktur Perekonomian



Zoom Meeting You are viewing Persidangan Kemenko Marves' screen View Options

Recording

RENCANA JALUR TENGAH SELATAN




Segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) meliputi :
 Bagbag, Kiaradua, Lengkong, Segaranten,
 Tangeung, Ciwidley, Pangalengan, Cikajang, bantar
 kalong, Kerta rahayu.
 Panjang total jalur tengah selatan Jabar kuang lebih
 321, 26 Km

Perkiraan Biaya Wilayah Barat dan Wilayah Timur
 Rp. 2.675.199.880.000,-

Dokumen Perencanaan

- FS tahun 2014
- Ka Andal tahun 2016
- Preliminary Design tahun 2019



Participants (109)

Find a participant

- DM D3 Marves Erlangga (Me)
- Menko Kemaritiman dan Investasi (Host)
- Persidangan Kemenko Marves (Co-host)
- DM D3 Marves - Thias Anggoro (Co-host)
- Persidangan Maritim (Co-host)
- FY faisal y
- Abdul Kamarzuki - Dirjen TR
- AR achmad rizhal
- Agustina M - Deputi Marves - SETKAB
- AY Ahmad Yani - Dir Angkutan Jalan
- A- Ali - Asdep A2- D3
- AK Ali Roren KKP

Invite Unmute Me Raise Hand

Unmute Start Video Participants (109) Chat Share Screen Record Reactions Leave

Type here to search

11:07 16/02/2021



Penjelasan capaian IKU untuk setiap SS diuraikan sebagai berikut:

SS.1

Terwujudnya Sistem Konektivitas yang Terpadu

SS.1. SS ini bertujuan untuk mewujudkan sistem konektivitas yang terpadu. Sistem konektivitas yang terpadu dimaksud sebagai sebuah jaringan yang berkesinambungan dan antar tiap infrastruktur konektivitas memiliki peran dan fungsi masing-masing, baik pelabuhan, stasiun, terminal, maupun bandara. Jaringan pelabuhan utama terpadu menjadi isu perwujudan sistem konektivitas dalam *major project* Nasional Tahun 2020-2024 (sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024). Proses pencapaian sistem konektivitas yang terpadu dilaksanakan dalam koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan pengendalian yang dilakukan bersama-sama dengan K/L terkait. Capaian SS ini diukur dengan IKU Presentase ketersediaannya jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.

SS.2

Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Antar Moda

SS.2. Ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur konektivitas antar moda (darat, laut, udara). Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas antar moda meliputi peningkatan transportasi perkotaan, pembangunan *integrated port development*, dan keterpaduan transportasi antar moda. Capaian SS ini diukur dengan IKU Presentase rekomendasi pengendalian kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas Antar moda yang dihasilkan.

SS.3

Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Tata Kelola Transportasi Terpadu

SS.3. Ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur tata kelola transportasi terpadu (darat, laut, udara). Pemenuhan Infrastruktur tata kelola transportasi terpadu dilaksanakan melalui strategi

pembangunan pelabuhan baru dan pembangunan bandara baru. Capaian SS ini diukur dengan IKU Presentase rekomendasi pengendalian kebijakan Bidang Infrastruktur Tata Kelola Transportasi Terpadu yang dihasilkan.

SS.4

Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran

SS.4. Ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur pelayaran nasional. Pemenuhan Infrastruktur pelayaran dilaksanakan melalui strategi peningkatan pemenuhan standar pelabuhan utama dan

SS.5

Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas

Penanganan Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran. Capaian SS ini diukur dengan IKU Presentase rekomendasi pengendalian kebijakan Bidang Infrastruktur Pelayaran yang dihasilkan.

SS.5. Ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengendalian suatu kebijakan bidang Infrastruktur Konektivitas. Efektifitas rekomendasi kebijakan di Bidang Infrastruktur Konektivitas adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan/pengendalian kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas atas hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Capaian SS ini diukur dengan IKU jumlah rekomendasi pengendalian kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan.

SS.6

Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya

SS.6. Ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian tugas lainnya yang bersifat langsung dari pimpinan di bidang Infrastruktur Konektivitas. Proses pencapaian persentase penyelesaian tugas lainnya dilaksanakan dalam koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan pengendalian yang dilakukan bersama-sama dengan K/L terkait.. Capaian SS ini diukur dengan IKU persentase tugas lainnya yang dapat diselesaikan.

Table 14 Proyeksi Matrix LAKIP 2021 Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas

NO	SASARAN KEGIATAN		IKU	TARGET 2021	CAPAIAN %	Anggaran	
						Pagu	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective)							
SS.1	Terwujudnya Sistem Konektivitas yang Terpadu	1	Presentase Ketersediannya Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	100%	100%	-	-
Perspektif Pengguna (Customer Perspective)							
SS.2	Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Antar Moda	2	Presentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas Antar Moda yang dihasilkan	80%	100%	Rp. 660.956.000,-	Rp. 660.814.179,-
SS.3	Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Tata Kelola Transportasi Terpadu	3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Tata Kelola Transportasi Terpadu yang dihasilkan	70%	100%	Rp. 427.763.000,-	Rp. 427.744.483,-
SS.4	Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran yang dihasilkan	70%	100%	Rp. 586.122.000,-	Rp. 583.995.996,-
Perspektif Proses Internal Bisnis (Internal Business Perspective)							

SS.5	Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas	5	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas yang dihasilkan	7	7	Rp 1.674.841.000,-	Rp 1.672.554.658,-
SS.6	Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	6	Persentase Tugas Lainnya yang dapat Diselesaikan	100%	100%	-	-

Table 15 Perbandingan Capaian Lakip 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Target 2021
		2020	2021	
1	Presentase Ketersediannya Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	100%	100%	100%
2	Presentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas Antar Moda yang dihasilkan	100%	100%	80%
3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Tata Kelola Transportasi Terpadu yang dihasilkan	100%	100%	70%
4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran yang dihasilkan	100%	100%	70%
5	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas yang dihasilkan	7	7	7
6	Persentase Tugas Lainnya yang dapat Diselesaikan	-	100%	100%

Table 16 Perbandingan Capaian TW I 2021

No	IKU	Target 2021	Capaian TW I 2020	Capaian TW I 2021	Progress Capaian
1	Presentase Ketersediannya Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
2	Presentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas Antar Moda yang dihasilkan	80%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Tata Kelola Transportasi Terpadu yang dihasilkan	70%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran yang dihasilkan	70%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
5	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas yang dihasilkan	7	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	25%
6	Persentase Tugas Lainnya yang dapat D diselesaikan	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	

Table 17 Perbandingan Capaian TW II 2021

No	IKU	Target 2021	Capaian TW I 2020	Capaian TW I 2021	Progress Capaian
1	Presentase Ketersediannya Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
2	Presentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas Antar Moda yang dihasilkan	80%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Tata Kelola Transportasi Terpadu yang dihasilkan	70%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran yang dihasilkan	70%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
5	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas yang dihasilkan	7	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	50%
6	Persentase Tugas Lainnya yang dapat D diselesaikan	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	

Table 18 Perbandingan Capaian TW III 2021

No	IKU	Target 2021	Capaian TW I 2020	Capaian TW I 2021	Progress Capaian
1	Presentase Ketersediannya Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	
2	Presentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas Antar Moda yang dihasilkan	80%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Tata Kelola Transportasi Terpadu yang dihasilkan	70%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran yang dihasilkan	70%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
5	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas yang dihasilkan	7	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%
6	Persentase Tugas Lainnya yang dapat Diselesaikan	100%	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	75%

Table 19 Perbandingan Capaian TW IV 2021

No	IKU	Target 2021	Capaian TW I 2020	Capaian TW I 2021	Progress Capaian
1	Presentase Ketersediannya Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas Antar Moda yang dihasilkan	80%	100%	100%	100%
3	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Tata Kelola Transportasi Terpadu yang dihasilkan	70%	100%	100%	100%
4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran yang dihasilkan	70%	100%	100%	100%
5	Jumlah Rekomendai Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas yang dihasilkan	7	100%	100%	100%
6	Persentase Tugas Lainnya yang dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%

● **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai IKU dimaksud sampai dengan triwulan IV tahun 2021 yaitu**

Pendukung : Dukungan Ratas dan Rakor Tingkat Menteri terkait Infrastruktur Konektivitas

Penghambat :

1. Pembatasan mobilitas akibat PPKM (Pandemi Covid-19)
2. Terjadinya tumpang tindih kewenangan antar unit kerja
3. Ego sektoral K/L/Pemda terkait

- **Beberapa upaya (inovasi) yang dilakukan Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas untuk meningkatkan Presentase rekomendasi pengendalian kebijakan bidang Infrastruktur Konektivitas diantaranya:**
 1. Melakukan pembahasan kebijakan Perpres secara vertikal dan horizontal serta bersinergi dan berkolaborasi antar kementerian/lembaga sejak penyusunan Rencana Aksi Perpres
 2. Melakukan Monev sebelum kebijakan ditetapkan dengan melaksanakan kunjungan lapangan secara langsung ke lokasi proyek prioritas

- **Success story atas capaian IKU sampai dengan TW IV**
 1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat telah selesai pada Bulan Agustus, serta website tentang Pelayaran Rakyat sudah dapat diakses di <https://pelra.maritim.go.id>.
 2. Peresmian Terminal Multipurpose Labuan Bajo oleh Presiden pada tanggal 13 November 2021, pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo dimulai sejak Juni 2020 yang juga dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas.
 3. Dokumentasi Kegiatan s.d TW IV









ASISTEN DEPUTI INDUSTRI PENDUKUNG INFRASTRUKTUR

Penjelasan capaian IKU untuk setiap SS diuraikan sebagai berikut:

Table 20 Proyeksi Matrix LAKIP 2021 Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur

NO	SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET 2021	CAPAI AN %	Anggaran	
					Pagu	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective)						
SS.1	Meningkatnya Produktifitas Industri Pendukung Infrastruktur	1	Pembangunan dan Beroperasinya Kawasan Industri Prioritas Nasional	4 Kawasan Industri (kumulatif)	2.031.234.000	1.528.207.130 realisasi SAS per 13 Desember (adanya perubahan anggaran, pengurangan anggaran, dan revisi anggaran; semula 2.031.234.000)

							menjadi 1.533.906.000)
Perspektif Pengguna (Customer Perspective)							
SS.2	Terwujudnya Pertumbuhan Infrastruktur Digital	2	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Digital	75%	100%	477.077.400	286.586.484 realisasi SAS per 13 Desember (adanya perubahan anggaran, pengurangan anggaran, dan revisi anggaran; semula 477.077.400 menjadi 286.827.000)
SS.3	Terwujudnya Pertumbuhan Kawasan Industri	3	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kawasan Industri	75%	100%	1.077.078.400	823.695.443 realisasi SAS per 13 Desember (adanya perubahan anggaran, pengurangan anggaran, dan revisi anggaran; semula 1.077.078.400 menjadi 828.775.000)
SS.4	Terwujudnya Pertumbuhan Industri	4	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi	75%	100%	477.078.200	417.925.203 realisasi SAS per 13 Desember (adanya perubahan

	Bahan Baku Infrastruktur		i dan Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Bahan Baku Infrastruktur				anggaran, pengurangan anggaran, dan revisi anggaran; semula 477.078.200 menjadi 418.304.000)
Perspektif Proses Internal Bisnis (Internal Business Perspective)							
SS.5	Elektifitas rumusan kebijakan di Bidang Industri Pendukung Infrastruktur	5	Persentase rumusan kebijakan di bidang Industri Pendukung Infrastruktur yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%	100%	2.031.234.000	1.528.207.130 realisasi SAS per 13 Desember (adanya perubahan anggaran, pengurangan anggaran, dan revisi anggaran; semula 2.031.234.000 menjadi 1.533.906.000)

Table 21 Perbandingan Capaian Lakip 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Target 2021
		2020	2021	
1	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Digital	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kawasan Industri	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
3	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Bahan Baku Infrastruktur	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

Table 22 Perbandingan Capaian TW 2021

No	IKU	Target 2021	Realisasi TW I 2020	Realisasi TW I 2021	Progress Capaian
1	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Digital	75%	0 dokumen	0 Dokumen	25%
2	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kawasan Industri	75%	0 dokumen	0 Dokumen	25%

3	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Bahan Baku Infrastruktur	75%	0 dokumen	0 Dokumen	25%
----------	---	-----	-----------	-----------	-----

No	IKU	Target 2021	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Progress Capaian
1	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Digital	75%	0 dokumen	1 Dokumen	50%
2	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kawasan Industri	75%	0 dokumen	1 Dokumen	50%
3	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Bahan Baku Infrastruktur	75%	0 dokumen	1 Dokumen	50%

No	IKU	Target 2021	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Progress Capaian
1	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Digital	75%	0 dokumen	1 Dokumen	75%

2	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kawasan Industri	75%	0 dokumen	1 Dokumen	75%
3	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Bahan Baku Infrastruktur	75%	0 dokumen	1 Dokumen	75%

No	IKU	Target 2021	Realisasi TW IV 2020	Realisasi TW IV 2021	Progress Capaian
1	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Digital	75%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kawasan Industri	75%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Persentase Rekomendasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Bahan Baku Infrastruktur	75%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

- Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai IKU dimaksud sampai dengan triwulan IV tahun 2021 yaitu:

Pendukung :

- Kerjasama dan koordinasi yang baik antar stakeholders (K/L) walaupun tidak dalam koordinasi Kemenko Marves, seperti Kemenperin, Kominfo, Kemendagri.
- Adanya kegiatan penyelerasan program di awal dan akhir tahun, sehingga koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian berjalan lebih efektif.

Penghambat :

- Disharmonisasi dan kurangnya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Alokasi anggaran yang terbatas dan refocussing anggaran

- Beberapa upaya (inovasi) yang dilakukan Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur untuk meningkatkan Persentase rekomendasi pengendalian kebijakan bidang Industri Pendukung Infrastruktur diantaranya:

- Workshop dan sosialisasi
- Konsolidasi dengan aparat pengendalian dan pengawasan di tingkat daerah

- *Success story* atas capaian IKU sampai dengan TW IV :

- Penyelesaian masalah pajak air permukaan antara Pemprov Sumatera Utara dengan PT Inalum
- Dukungan koordinasi dan sinkronisasi perijinan untuk beroperasinya Kawasan Industri Galang Batang untuk mendukung proses ekspor Alumina
- Dukungan koordinasi dan sinkronisasi perijinan untuk beroperasinya Kawasan Industri Pulau Obi untuk mendukung proses ekspor *Mix Hydroxite Precipitated* (MHP)
- Peningkatan penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional naik lebih dari 100% dari tahun 2020, dari 275 km menjadi 418 km walaupun secara nasional masih 34% dari total keseluruhan jalan nasional.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap SS diuraikan sebagai berikut:

SS.1 Meningkatnya Industri Maritim dan Transportasi

SS.1. SS ini bertujuan untuk meningkatkan Meningkatnya Industri Maritim dan Transportasi adalah mewujudkan Industri Maritim dan Transportasi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan basis industri manufaktur dan pengembangan produk melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Capaian SS ini diukur dengan IKU Pemantauan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

SS.2 Terwujudnya Peningkatan Industri Maritim

SS.2. Ini bertujuan untuk Terwujudnya Peningkatan Industri Maritim adalah meningkatnya produktivitas dan daya saing Industri Maritim melalui terselesaikannya formulasi kebijakan di Bidang Industri Maritim hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Capaian SS ini diukur dengan IKU persentase rekomendasi pengendalian kebijakan bidang industri maritim yang dihasilkan.

SS.3 Terwujudnya Peningkatan Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian

SS.3. Ini bertujuan untuk terwujudnya Peningkatan Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian adalah meningkatnya produktivitas dan daya saing Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian melalui terselesaikannya formulasi kebijakan di Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait . Capaian SS ini diukur dengan IKU persentase rekomendasi pengendalian kebijakan bidang industri kedirgantaraan dan perkeretaapian yang dihasilkan.

SS.4**Terwujudnya Peningkatan Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik**

SS.4. Ini bertujuan untuk terwujudnya Peningkatan Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik adalah Meningkatnya produktivitas dan daya saing Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik melalui terselesaikannya formulasi kebijakan di Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Capaian SS ini diukur dengan IKU persentase rekomendasi pengendalian kebijakan bidang industri manufaktur dan kendaraan listrik yang dihasilkan.

SS.5**Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Industri Maritim dan Transportasi**

SS.5. Ini bertujuan untuk tersedianya rekomendasi pengendalian kebijakan bidang industri maritim dan transportasi adalah terselesaikannya formulasi pengendalian kebijakan bidang industri maritim dan transportasi hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait . Capaian SS ini diukur dengan IKU persentase rumusan kebijakan di bidang industri maritim dan transportasi yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan.

NO	SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET 2021	CAPAIAN %	Anggaran	
					Pagu	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective)						
SS.1	Meningkatnya Industri Maritim dan Transportasi	1	Pemantauan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	100%		
Perspektif Pengguna (Customer Perspective)						

SS.2	Terwujudnya Peningkatan Industri Maritim	2	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Maritim yang dihasilkan	80%	100	Rp 408.086.000,-	Rp 402.538.233,-
SS.3	Terwujudnya Peningkatan Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian	3	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian yang dihasilkan	70%	100	Rp 191.072.000,-	Rp 191.040.187,-
SS.4	Terwujudnya Peningkatan Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik	4	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik yang dihasilkan	80%	100	Rp 1.069.292.000,-	Rp 1.069.205.370,-
Perspektif Proses Internal Bisnis (Internal Business Perspective)							
SS.5	Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Industri Maritim dan Transportasi	5	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Industri Maritim dan Transportasi yang dijadikan sebagai	100%	100	Rp 1.668.450.000,-	Rp 1.662.783.790,-

		rancangan kebijakan				
--	--	---------------------	--	--	--	--

Table 23 Perbandingan Capaian LAKIP 2021 Asisten Deputi Industri Maritim Dan Transportasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Target 2021
		2020	2021	
1	Pemantauan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	100 %	100%	100
2	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Maritim yang dihasilkan	121,43 %	100%	80
3	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian yang dihasilkan	133,33 %	100%	70
4	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik yang dihasilkan	121,43 %	100%	80
5	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Industri Maritim dan Transportasi yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%	100%	100

Table 24 Perbandingan Capaian TW I 2021 Asisten Deputi Industri Maritim Dan Transportasi

No	IKU	Target 2021	Capaian TW I 2020	Capaian TW I 2021	Progress Capaian
1	Pemantauan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	100			
2	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Maritim yang dihasilkan	80	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A
3	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian yang dihasilkan	70	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A
4	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik yang dihasilkan	80	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A
5	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Industri Maritim dan Transportasi yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%			

Table 25 Perbandingan Capaian TW II 2021 Asisten Deputi Industri Maritim Dan Transportasi

No	IKU	Target 2021	Capaian TW II 2020	Capaian TW II 2021	Progress Capaian
1	Pemantauan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	100			
2	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Maritim yang dihasilkan	80	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A
3	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian yang dihasilkan	70	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A
4	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik yang dihasilkan	80	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A
5	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Industri Maritim dan Transportasi yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%			

Table 26 Perbandingan Capaian TW III 2021 Asisten Deputi Industri Maritim Dan Transportasi

No	IKU	Target 2021	Capaian TW III 2020	Capaian TW III 2021	Progress Capaian
1	Pemantauan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	100			
2	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Maritim yang dihasilkan	80	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A
3	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian yang dihasilkan	70	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A
4	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik yang dihasilkan	80	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A (Dikarenakan berdasarkan PK jadwal keluaran kinerja TW IV)	N/A
5	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Industri Maritim dan Transportasi yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%			

Table 27 Tabel Perbandingan Capaian TW IV 2021 Asisten Deputi Industri Maritim Dan Transportasi

No	IKU	Target 2021	Capaian TW IV 2020	Capaian TW IV 2021	Progress Capaian
1	Pemantauan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	100	100 %	100%	100
2	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Maritim yang dihasilkan	80	121,43 %	100%	100
3	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian yang dihasilkan	70	133,33 %	100%	100
4	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik yang dihasilkan	80	121,43 %	100%	100
5	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Industri Maritim dan Transportasi yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100	100%	100%	100

- Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai IKU dimaksud sampai dengan triwulan IV tahun 2021 yaitu:

Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Maritim yang dihasilkan.

Industri Galangan Kapal Nasional

Pendukung :

- Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan mengharuskan tersedianya alat transportasi laut dalam mendukung konektivitas antar pulau
- Terdapat ribuan pulau di Indonesia yang perlu dihubungkan, membuat kebutuhan akan alat transportasi laut (kapal) meningkat setiap tahunnya dan ini merupakan peluang bagi industri galangan kapal nasional baik itu dari repair maupun bangunan baru.
- Dukungan dan dorongan Menko sebagai ketua timnas p3dn yang mengharuskan kapal-kapal yang dibangun dengan menggunakan APBN wajib mempunyai TKDN dan dibangun di galangan dalam negeri
- Kebijakan pemerintah untuk membatasi impor kapal bekas melalui umur kapal serta kapal-kapal yang sudah dapat diproduksi dalam negeri

Penghambat :

- Di Renstra Kemenperin sendiri target dari PP Industri Maritim yaitu 2023
- Proyek pengadaan kapal baru oleh pemerintah dan BUMN yang saat ini masih dijadikan sebagai pendapatan utama dari sebagian besar galangan kapal dalam negeri di dua tahun terakhir menurun dari segi kuantitasnya sehingga menurun pula kuantitas produk galangan kapal dalam negeri khususnya kapal baru.
- Peningkatan tindakan pengawasan terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri sangat diperlukan dan harus terus menerus digalakan untuk menjamin penggunaan produk dalam negeri yang merata dalam produk produk di galangan kapal.
- Belum adanya satu landasan hukum yang permanen terkait dengan industri maritim, untuk itulah saat ini Kemenko Marves berkoordinasi bersama dengan Kemenperin, Kemenhub, Asosiasi Galangan Kapal, Asosiasi Produsen Komponen Kapal serta K/L terkait sedang melakukan penyusunan Rancangan Aturan berupa Peraturan Pemerintah tentang Industri Maritim. Kondisi saat ini sudah 85 % rampung draft nya,

dan diharapkan paling lambat pertengahan tahun 2022 Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut sudah bisa ditetapkan sebagai satu dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam pengembangan industri maritim kedepan.

Industri Komponen Kapal

Pendukung :

- Dukungan dan dorongan Menko sebagai ketua timnas p3dn yang mengharuskan kapal-kapal yang dibangun dengan menggunakan APBN wajib mempunyai TKDN dan menggunakan komponen-komponen dalam negeri
- Jumlah armada kapal di Indonesia yang mencapai 29 ribu (data Ditjen Hubla) armada menjadikan peluang bagi industri komponen kapal dalam negeri untuk berkontribusi
- Ketersediaan bahan baku yang melimpah untuk beberapa jenis komponen kapal contohnya karet

Penghambat :

- Dalam rangka percepatan pencapaian target ekspor produk perikanan maka KKP melakukan penyusunan Permen KKP terkait percepatan peningkatan produksi perikanan. Hanya saja pada Draft Permen KKP cenderung mengizinkan importasi kapal (bekas) melalui rekomendasi Kemenperin. Dimana sebenarnya Galangan Kapal dalam negeri sudah mampu membuat.
- Akibat dari produk kapal yang dihasilkan oleh galangan kapal dalam negeri 60-70% komponen utama dan pendukung masih berasal dari impor mengakibatkan suatu kondisi ketergantungan yang sangat kuat terhadap impor. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya saing dari sisi harga dibandingkan dengan produk yang sama hasil dari galangan kapal asing.
- Pemberian Stimulus terkait dengan pajak impor yang sangat diharapkan oleh para pelaku bisnis galangan kapal sebesar 0% terhadap komponen kapal yang belum terealisasi hingga saat ini, sehingga sulit bagi galangan kapal dalam negeri meningkatkan daya saingnya.
- Pembinaan terhadap produsen komponen kapal agar meningkatkan kualitas produknya harus selalu ditingkatkan dan pemberian sertifikat layak pakai terhadap produk-produk

secara masif dan bersubsidi sehingga akan menimbulkan gairah dari produsen komponen kapal untuk meningkatkan kualitas dan jumlah produknya yang bersertifikat.

Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian yang dihasilkan

Industri Kedirgantaraan

Pendukung :

- Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memerlukan pesawat udara sebagai alat transportasi penumpang dan barang antar pulau yang cepat dan efisien
- Potensi pasar industri kedirgantaraan domestik dan kawasan yang besar sangat terbuka untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya oleh pelaku industri dalam negeri
- Dukungan dan dorongan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Timnas P3DN untuk menggunakan produk dalam negeri pada pengadaan yang menggunakan dana APBN (yang telah memenuhi TKDN minimal 40% menjadi barang wajib sesuai PP no. 29 tahun 2018)

Penghambat :

- Dengan adanya perubahan organisasi LAPAN dan BPPT menjadi BRIN, terdapat kendala anggaran untuk melanjutkan pengembangan Pesawat N-219 amfibi dan PSN Puna Male

Industri Perkeretaapian

Pendukung :

- Dukungan dan dorongan Menko sebagai ketua timnas P3DN untuk menggunakan produk dalam negeri pada pengadaan yang menggunakan dana APBN (yang telah memenuhi TKDN minimal 40% menjadi barang wajib sesuai PP no. 29 tahun 2018)
- Adanya BUMN Integrator dan Operator Kereta Api yang telah berkembang di Indonesia yang dapat mendorong pengembangan industri pendukung dan komponen kereta api
- kebutuhan pengembangan moda transportasi berbasis rel untuk daerah perkotaan/kawasan di Indonesia

Penghambat :

- Perlunya peningkatan kualitas komponen kereta produksi dalam negeri dan sinergitas antar antara pelaku industri, Lembaga riset, dan pembuat kebijakan.

Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik yang dihasilkan

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pendukung :

- dorongan dan arahan presiden utk meningkatkan penggunaan produk-produk Indonesia dan juga bangga terhadap produksi dalam negeri, termasuk dilakukan juga peningkatan kualitas produk dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri
- dukungan dan dorongan menko sebagai ketua timnas p3dn
- dukungan dan kerjasama seluruh k/l/pemda dan stakeholders terkait dalam mewujudkan program p3dn (kebijakan, perencanaan, anggaran, sertifikasi gratis, integrasi data antar k/l, sosialisasi)
- program pemerintah substitusi impor 35% pada tahun 2022 mendorong penggunaan PDN lebih tinggi
- momen pandemi dimana perdagangan antar negara dibatasi mampu membangkitkan kesadaran pentingnya industri dalam negeri yang mandiri dan berdaya saing serta tidak tergantung impor

Penghambat :

- Sosialisasi program harus dilakukan lebih masif
- Pokja belum optimal krn perubahan nomenklatur di K/L

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pendukung :

- Dukungan dan kerjasama k/l dan stakeholders terkait dalam mewujudkan percepatan program kblbb (kebijakan, insentif fiskal dan non fiskal, manufaktur, sosialisasi, investasi)
- Support dan dorongan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Tim Koordinasi KBLBB
- Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi CO₂ sebesar 29% pada tahun 2030 mendorong penggunaan KBLBB
- Ketersediaan bahan baku baterai sebagai komponen utama KBLBB yang melimpah
- Teknologi KBLBB/BEV mulai berkembang pesat, dimana hal ini akan menjadi keniscayaan dalam perkembangan industri otomotif. Ini menjadi momentum & kesempatan bagi industri otomotif dalam negeri, termasuk industri komponen utama dan pendukung KBLBB serta industri *charging station/ battery swap*
- Banyaknya inovasi karya anak bangsa baik KBLBB baru maupun konversi dari kendaraan konvensional

Penghambat :

- Penyesuaian TKDN dengan skema investasi
- Penyusunan Permenhub PNBK Konversi membutuhkan waktu karena bersamaan dengan PNBK lainnya
- Penyesuaian skema bisnis *Charging Station* agar lebih implementatif

Beberapa upaya (inovasi) yang dilakukan Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi untuk meningkatkan Presentase rekomendasi pengendalian kebijakan bidang industri maritim diantaranya:

Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Maritim :

- Koordinasi Kemenperin, Kemenko Ekon, Kemenkeu, BPPT, BUMN, dan Asosiasi Pelaku Industri
- Telah terbit aturan Revisi Permendag No.76 Tahun 2019 yaitu Permendag No.20 Tahun 2021
- FGD kemampuan industri komponen kapal DN dan Penyusunan skema/komposisi TKDN dalam pembangunan kapal negara
- Pembahasan khusus terkait pasal-pasal untuk meminimalisir impor kapal perikanan baru dan/atau bekas.
- Dalam rangka menguatkan landasan pijak hukum pengembangan Industri Maritim Indonesia maka Kemenko Marves berkoordinasi dengan K/L terkait (Kemenperin, Kemenhub, Kemenkeu, PAL, BKI, Asosiasi Industri Galangan Kapal, Asosiasi Industri Komponen Kapal, Asosiasi Pemilik Kapal) dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Industri Maritim. Sampai saat ini Draft RPP tentang Industri Maritim sudah mencapai 85% rampung. Di targetkan paling lambat pada kuartal pertama tahun 2022, RPP dimaksud telah ditetapkan sebagai aturan yang permanen.

Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian :

- Kolaborasi di antara regulator, manufaktur, operator, dan *financier* dalam percepatan pengembangan Pesawat N219 Amphibi
- Koordinasi PSN pengembangan drone, PRN pengembangan

Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik:

- Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
- Pemantauan P3DN prioritas pada sektor energi (PLN & Pertamina), Alat Kesehatan, dan pengadaan TIK di Kemendikbudristek sejak tahap perencanaan
- Pengembangan Sistem P3DN terintegrasi & online (SIRUP, KRISNA, database PDN, BKPM, Bea Cukai)
- Program lanjutan sertifikasi TKDN gratis tahun 2022 untuk mendorong substitusi impor 35%

- Pengesahan Kepmenko Pokja Timnas P3DN
- Koordinasi penyusunan Penggunaan KBLBB di lingkup K/L/PD/BUMN/D
- Pengesahan Revisi Permenperin 27/2020
- Sosialisasi dan perluasan program konversi sepeda motor untuk mendukung target sepeda motor konversi 6 juta unit pada Tahun 2025 & Pengesahan Revisi Permenhub 32/2020
- Penyelesaian Revisi Permen ESDM 13/2020
- Koordinasi kesiapan dukungan KBLBB pada KTT G20

Success story atas capaian IKU sampai dengan TW IV berupa :

Bidang Industri Maritim :

- Koordinasi dengan K/L (Kemenperin, Kemenhub, Kemenkeu) Asosiasi Galangan Kapal (IPERINDO), Asosiasi Produsen Komponen Kapal (PIKKI), Asosiasi Pengusaha Pemilik Kapal (INSA), dan Asosiasi Pengusaha Kapal Galangan Kapal Tradisional, terkait permasalahan industri galangan kapal dan komponen kapal dalam mendukung kebijakan pemberian stimulus dan insentif 0% untuk pajak impor komponen kapal yang dikaitkan dengan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- Peningkatan Jumlah Prosentase Serifikasi Yang dikeluarkan Kemenperin terhadap produk Komponen Kapal yang produk-produknya telah dimasukkan dalam katalog Asosiasi Produsen Komponen Kapal (PIKKI - Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia). Dimana dari 120 jenis komponen kapal yang menjadi produk dari anggota PIKKI . 40 % nya telah bersertifikat, 17% dalam sudah diusulkan dan sisanya 43% lagi dalam tahap proses pemenuhan dokumen pendukung utk diusulkan.
- Telah diusulkan untuk Perubahan Permendag 76 Tahun 1919 Tentang Kebijakan Impor Barang Modal Bukan Baru, dan telah dirubah menjadi Permendag No.20 Tahun 2021
- Telah diselesaikannya 85% dari Draft RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Tentang Industri Maritim, berkoordinas dengan K/L terkait.

Bidang Industri Kedirgantaraan dan Perkeretaapian :

- Draft Roadmap Industri Dirgantara

Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik :

- KBL BB, Insentif PPn BM untuk KBL BB sebesar 0 %, melalui PP 74 tahun 2021
- P3DN, Web pengaduan pelanggaran TKDN

Dokumentasi Kegiatan TW 1 s.d TW IV



Kunjungan ke Balai Besar Teknologi Konversi Energi



Penyusunan Master Plan Penggunaan BEV untuk Pertemuan G20 di Bali

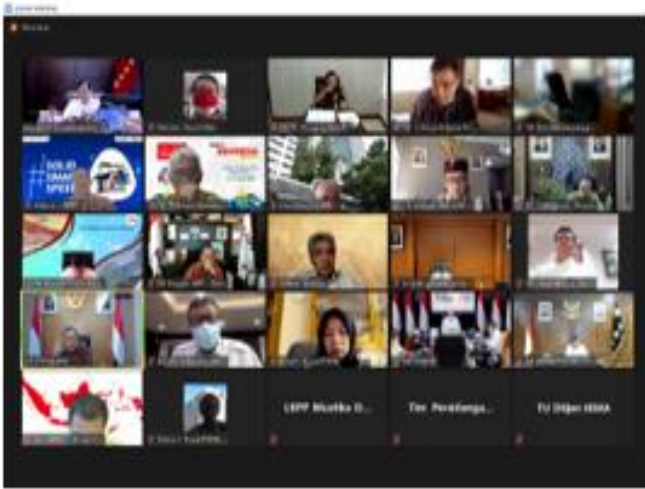


Kunjungan Kerja dan Koordinasi Teknis Terkait Potensi Kemampuan Industri Galangan Kapal dan Industri Komponen Kapal Dalam Negeri



Rangka Konsinyering Pembahasan terkait TKDN
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Empat

Rangka Konsinyering Pembahasan terkait TKDN
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Empat



Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi - Audit P3DN



Diskusi dan Peninjauan Lapangan Pilot Project Konversi KBLBB Roda Dua ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan EBTKE, Kementerian ESDM

Kunjungan ke PT. INKA (Persero)



Konsinyering Rencana Pemantauan P3DN pada Proyek Pembangkit Energi Baru Terbarukan di PT PLN (Persero) dan Proyek



Konsinyering Pemetaan Ekosistem Industri Sarana dan Prasarana Perkeretaapian di Indonesia



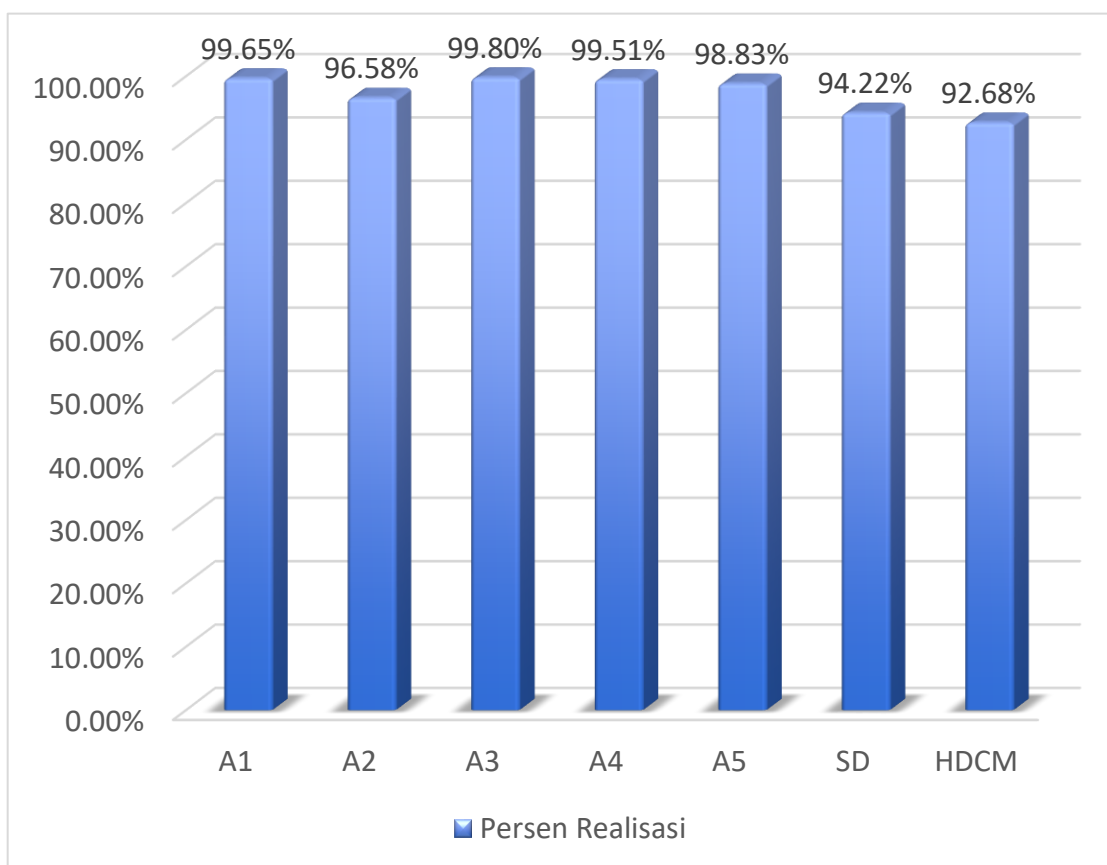
Forum Sinergitas Ditjen ILMATE Tahun 2021



Launching SPKLU Kerjasama antara BPPT dengan PT. Pertamina (Persero)

Realisasi Anggaran D3 T.A 2021

	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persen Realisasi
D3	14,185,599,000	13,718,044,611	467,554,389	96.70%
A1	1,764,807,000	1,758,621,843	6,185,157	99.65%
A2	1,810,535,000	1,748,524,914	62,010,086	96.58%
A3	1,674,841,000	1,671,417,658	3,423,342	99.80%
A4	1,533,906,000	1,526,457,130	7,448,870	99.51%
A5	1,687,260,000	1,667,459,095	19,800,905	98.83%
SD	3,234,250,000	3,047,163,302	187,086,698	94.22%
HDCM	2,480,000,000	2,298,400,669	181,599,331	92.68%



Posisi Dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Per 16 Desember 2021 (12.00WIB) adalah **96,96%**



Per **16-Dec-21** **Sore**

Deskripsi	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Kementerian Koordinator Bidang Ke	264.977.466.000	256.915.207.394	8.062.258.606	96,96%
S Sekretariat Kementerian Koordinator Bid	169.722.141.000	166.804.607.791	2.917.533.209	98,28%
D1 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan M	27.715.666.000	27.156.761.555	558.904.445	97,98%
D1 diluar yg telah dialihfungsikan*	25.200.765.000	25.088.160.992	112.604.008	99,55%
D2 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya	12.299.998.000	11.745.247.308	554.750.692	95,49%
D3 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur da	14.185.599.000	13.702.324.611	483.274.389	96,59%
D4 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan L	12.375.000.000	11.097.519.864	1.277.480.136	89,68%
D5 Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dar	13.251.972.000	11.971.953.840	1.280.018.160	90,34%
D6 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan F	15.427.090.000	14.436.792.425	990.297.575	93,58%

*yang dialihfungsikan Rp 1.4626 M + Rp 1M=2.4626 M



Berdasarkan catatan Biro Perencanaan, realisasi anggaran D3 menduduki salah satu yang tertinggi diantara Kedeputian yaitu:

- Penyerapan anggaran per tgl. 16 Desember 2021 yaitu 96.59%

DINAMIKA ANGGARAN DEPUTI

Refokusing Anggaran IV (23 Juli 2021) berdasarkan srt Kemenkeu no. S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021, dimana Kemenko Marves mendapatkan Refokusing sebesar 19,4M dan D3 mendapatkan **pembebanan** senilai **2,7M** pada Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan.

Optimalisasi Anggaran (30 Agustus 2021) dikarenakan kondisi pandemi shg kegiatan tdk sepenuhnya dilaksanakan (AIS-D1, EITI-D6) sebesar 12,7M, D3 mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar **2,5M** pada kegiatan Sekretariat HIDCM

Pemindahan Anggaran Pengadaan Meubelair kepada Biro Umum (27 Oktober 2021). untuk pengadaan meubeler di ruang kerja Lt.16 mengharuskan pencairan menggunakan akun belanja modal yang hanya ada di Biro Umum sejumlah 64,400,000.

Pemunculan Akun Covid-19 di Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan (Asdep) yaitu akun Belanja Jasa Pandemi (522192) dan Belanja Barang Operasional Pandemi (521131) dengan catatan belanja barang harus tersentralisasi di salah satu asdep, menyebabkan perubahan struktur anggaran

DIPA 2022 disahkan pada tanggal 23 November 2020, D3 mendapatkan anggaran sejumlah **14,449,999,000** terdiri dari Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Dukungan Manajemen.

	Deskripsi	Pagu Semula	Refocusing IV	Optimalisasi Anggaran	Pemindahan Anggaran Meubelair	Pemunculan Akun Covid di Asdep
	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	14,449,999,000	11,749,999,000	14,249,999,000	14,185,599,000	14,185,599,000
A1	Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air	2,261,006,000	1,776,807,000	1,776,807,000	1,776,807,000	1,764,807,000
A2	Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah	2,277,164,000	1,716,345,000	1,716,345,000	1,716,345,000	1,810,535,000
A3	Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Konektivitas	2,262,875,000	1,692,841,000	1,692,841,000	1,692,841,000	1,674,841,000
A4	Asisten Deputi Bidang Industri Pendukung Infrastruktur	2,031,234,000	1,569,096,000	1,569,096,000	1,569,096,000	1,533,906,000
A5	Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi	2,319,070,000	1,696,260,000	1,696,260,000	1,696,260,000	1,687,260,000
SD	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	3,298,650,000	3,298,650,000	3,298,650,000	3,234,250,000	3,234,250,000
HDCM	Sekretariat <i>High-Level Dialogue and</i>	-	-	2,500,000,000	2,500,000,000	2,480,000,000

Cooperation Mechanism						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

NILAI HASIL EVALUASI SAKIP 2021



No	Komponen	Hasil Evaluasi 2020		Hasil Evaluasi 2021	
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	43	32,20	43	32,63
2.	Pengukuran Kinerja	36	20,63	36	23,61
3.	Pelaporan Kinerja	21	13,42	21	13,48
Nilai Hasil Evaluasi		100	66,25	100	69,72
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B		B

Peningkatan Nilai SAKIP Deputi 3 sejumlah **3,47** daripada tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi **69,72** dengan tingkat **Akuntabilitas Kinerja B** dan telah memenuhi target nilai SAKIP Deputi 3 tahun 2021 (67).

PEMUTAHIRAN PROSES PENGUMPULAN DATA LAPORAN PK MENKO/DEPUTI

Fungsi :

adanya perubahan pola dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh bagian program bertujuan untuk **mengefisiensi waktu** dalam memperoleh data serta dapat melengkapi laporan capaian kinerja dengan lebih detail dan valid

PK Menko/Deputi yang dilakukan monitoring secara langsung :



Pelabuhan utama terpadu/superhub



P3DN



Indeks Kinerja Logistik



Indeks Daya saing global

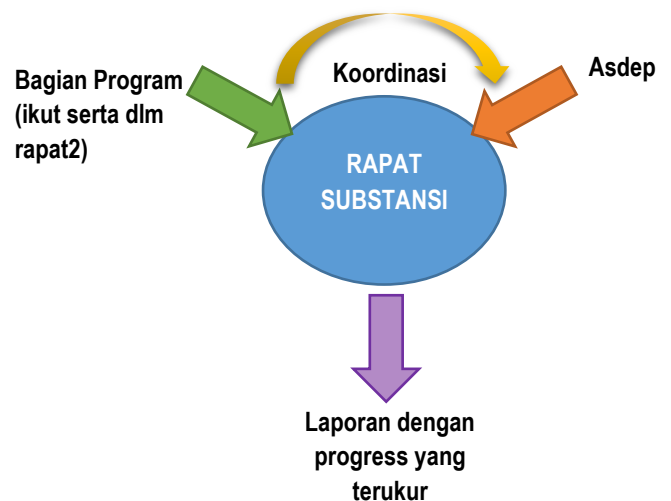


Indeks Disparitas ekonomi

Proses sebelumnya



Proses saat ini : ('jemput bola')



Sehubungan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja dan pelaksanaan penilaian indikator kinerja pada aspek ketaatan unit kerja dalam penyampaian laporan dan data kinerja lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sesuai dengan ketentuan:

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
- c. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelaporan di Lingkungan kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sampai dengan level Eselon I wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah penyampaian laporan bulanan dan kinerja

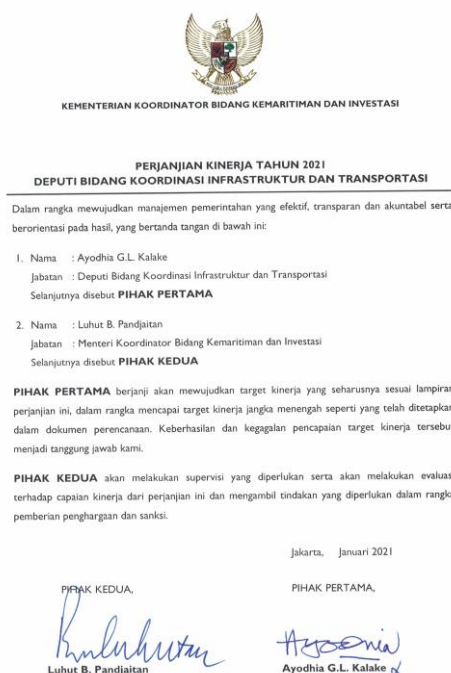
PERJANJIAN KINERJA LINGKUP DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar Perjanjian Kinerja Deputi (kiri) dan Perjanjian Kinerja Setdep (kanan)

PROGRAM PRIORITAS DAN QUICK WINS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

Quick Win atau yang diartikan sebagai program percepatan dalam Bahasa Indonesia, merupakan bagian dari kerangka besar pelaksanaan reformasi birokrasi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*. *Quick Wins* sering kali dianggap sebagai cerminan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Daerah.

Sebagai unit organisasi dari Lembaga publik, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi memiliki kewajiban secara formal dan secara moral untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan tuntutan reformasi yang terus diupayakan hingga saat ini dan terus berproses menjadi lebih baik. Di satu sisi, reformasi birokrasi juga merupakan keniscayaan bagi suatu bangsa untuk dapat survive ditengah-tengah dunia yang semakin mengglobal, tanpa batas dan sangat dinamis. Sehingga reformasi birokrasi merupakan bentuk adaptasi yang terus berproses untuk mampu mengantisipasi menghadapi kompleksitas dan dinamika yang begitu tinggi. Reformasi birokrasi sebagai instrument adaptasi, dari aspek premis dan aspek konsepsinya terus berkembang. Diawali tuntutan untuk menciptakan "*Good Governance*", kemudian menjadi lebih focus kepada upaya mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang terukur dengan penerapan "*New Public Management*", dan terakhir sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional, birokrasi diharapkan sudah mampu mewujudkan "*Dynamic Governance*".

Secara aplikatif, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tatakelola. pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan public.

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda melaksanakan Reformasi Birokrasi pada tahap ketiga dan terakhir dalam grand design Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2024. Kemenko Marves di tahun 2021 ini mendapatkan amanat lebih dari Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dengan perubahan baru ini organisasi Kemenko Marves meningkat tugas dan fungsinya, demikian juga dengan jumlah unit kerja yang ada, dari empat eselon 1 menjadi 6 eselon 1. Dengan demikian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves mendapat tantangan yang lebih tinggi karena selain meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) menuju tunjangan kinerja 80%, juga perlu didukung dengan unit eselon I pada Kemenko Marves mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta internalisasi Budaya Kerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit yang akan berkontribusi terhadap nilai Reformasi Birokrasi pada Kemenko Marves secara keseluruhan. Saat ini Kemenko Marves mendapatkan nilai Reformasi Birokrasi (per 2019) 69,13 (Enam Puluh Sembilan koma Tiga Satu) dengan persentase tunjangan kinerja sebesar 60%. Targetnya pada tahun 2020 Kemenko Marves mendapatkan indeks RB sebesar 80 dengan tunjangan kinerja sebesar 80%. Dalam mencapai target tersebut perlu dilaksanakan asistensi, pendudukan dan juga pendampingan dalam mengawal pelaksanaan RB Kemenko Marves agar dapat mencapai target nilai RB 80. Hal ini tentunya seiring dengan tantangan RB yang semakin meningkat untuk menghasilkan organisasi Kementerian yang mencapai World Class Government di tahun 2025, maka seluruh komponen pelaksana RB Kemenko Marves harus bersinergi dan juga senantiasa dibimbing dalam jalur pelaksanaan RB untuk men capai target-target yang diharapkan.

Deputi 3 merupakan organisasi baru pada Kemenko Marves yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pembentukan organisasi Deputi 3 disusun sebagai organisasi yang sudah lama terbentuk sebelumnya yaitu deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur pada Organisasi terdahulu yaitu Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur. Dengan perubahan bentuk organisasi dan pengayaan tugas dan fungsi, maka Deputi 3 juga ikut berperan dalam meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi Kemenko Marves agar tercapai tujuan mendapat nilai RB unit sebesar 80%. Dengan demikian, Deputi 3 menjalankan pelaksanaan RB Unit yang menjadi tolok ukur penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko Marves.

Berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- 2) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- 5) Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 6) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia Nomor 74/S Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Sekretariat Kementerian Koordinator.
- 7) Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2020-2024.

Maksud dari pelaksanaan Kajian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi ini adalah untuk melaksanakan RB yang telah ditetapkan secara nasional dan juga pembuatan bukti dukung dan mengawal pelaksanaan Roadmap RB Kemenko Marves.

Tujuan dari pelaksanaan Kajian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Meningkatkan capaian RB Kemenko Marves.
- 2) Menyiapkan rancangan data dukung RB yang dibutuhkan pada Deputi 3.
- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan RB Deputi 3.

Deputi 3 melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi didahului dengan penyusunan Rencana Kerja dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019, dalam evaluasi dari Kemenpan RB, terdapat 15 (empat belas) butir rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, yaitu:

- a. Mereviu Rancangan Roadmap Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko Marves untuk periode tahun 2020-2024 yang selaras dengan Roadmap RB Nasional.
- b. Berdasarkan data hasil survey integritas jabatan bahwa masih terdapat 49,61% pegawai yang masih perlu dibimbing karena masih tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan tidak

memahami ukuran keberhasilan tugas fungsi tersebut. 29,13% pegawai telah memahami tugas dan fungsi namun belum memahami ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas fungsi dan perjanjian kinerja. Hanya sebesar 21,26% yang memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilannya sesuai tugas fungsi pada jabatannya. Sehubungan dengan hal itu, perlu diberikan pemahaman kepada pegawai akan arti pentingnya pemahaman tugas dan fungsi dan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditretptkan dalam uraian tugas (job description) demikian halnya dengan perjanjian kinerja serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian kerja dimaksud.

- c. Mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh unit kerja dengan tidak hanya sebatas pada sosialisasi saja, tetapi sampai di proses monitoring dan evaluasi apakah internalisasi yang dilakukan sudah benar menyeluruh dan diimplementasikan pada setiap individu. Internalisasi yang dilaksanakan juga agar tidak sebatas kegiatan internal, tapi juga berdampak baik pada level unit kerja maupun instansi secara keseluruhan.
- d. Meningkatkan peran agen perubahan di setiap unit kerja untuk tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya akan tetapi mampu membangun social control diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas.
- e. Berubahnya nomenklatur kementerian menjadi Kemenko Marves menjadi sebab perlunya dilakukan identifikasi terhadap peraturan dalam bidang investasi dan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
- f. Untuk mempercepat terlaksananya merit sistem, agar Kemenko Marves menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- g. Menyempurnakan rumusan kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik di seluruh level organisasi secara berkala, melakukan penyesuaian antara kinerja yang akan dicapai dengan anggaran riil yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan terhadap hasil/kinerja tersebut, serta melakukan perbaikan atas hasil pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya.
- h. Menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan menetapkan hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian reward (pemberian tunjangan kinerja) dan punishment bagi yang tidak mencapai kinerja.
- i. Menyampaikan kepada seluruh unit organisasi untuk melaksanakan dengan baik kebijakan tentang penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, WBS dan penanganan benturan kepentingan.

Kegiatan dimaksud mencakup public campaign, implementasi, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan tindak lanjut hasil evaluasi.

- j. Mendorong penguatan integritas aparatur melalui penguatan penerapan sistem pengendalian internal serta program lain yang relevan dan diharapkan mampu memberikan deteksi dini potensi penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- k. Membangun unit-unit Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan lebih berorientasi kepada implementasi kegiatan anti korupsi dan juga pelayanan yang lebih mempermudah dan transparan prosesnya kepada stakeholder ditambah dengan inovasi-inovasi yang selain berdampak pada internal juga pada eksternal.

Dari evaluasi Kemenpan RB tersebut, pada rekomendasi huruf c, terdapat rekomendasi terkait dengan “Mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh unit kerja dengan tidak hanya sebatas pada sosialisasi saja, tetapi sampai di proses monitoring dan evaluasi apakah internalisasi yang dilakukan sudah benar menyeluruh dan diimplementasikan pada setiap individu. Internalisasi yang dilaksanakan juga agar tidak sebatas kegiatan internal, tapi juga berdampak baik pada level unit kerja maupun instansi secara keseluruhan” hal ini ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Tantangan terbesar adalah dengan perubahan organisasi Kemenko Maritim dan Investasi yang semakin meluas tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan RB harus disesuaikan dengan bentuk organisasi
- 2) Pendampingan dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap kesiapan unit dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit
- 3) Pembentukan tim RB Unit pada seluruh unit eselon I
- 4) Penyusunan rencana kerja RB Unit
- 5) Upload Bukti dukung pada aplikasi RB Internal melalui alamat <https://e-rb.maritim.go.id>
- 6) Melaksanakan koordinasi terus menerus dengan inspektorat dan sekretariat RB Unit
- 7) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Unit

Hasil terakhir pelaksanaan RB pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Unit dan Pembangunan Zona Integritas, sampai dengan Desember 2020:

- 1) Mempersiapkan bukti dukung Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.
- 2) Mempersiapkan bahan paparan evaluasi Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan

Transportasi.

- 3) Mengisi google drive bukti dukung pelaksanaan ZI Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dalam alamat

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mV4inxVe11LIXOrJvBbOW6ak5TvReK-a?sort=13&direction=a>)

- 4) Mempresentasikan paparan agen perubahan terkait inovasi pada Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.
- 5) Mendampingi dalam pelaksanaan paparan evaluasi RB dengan Menpan RB.
- 6) Memenuhi bukti dukung RB Unit dan Zona Integritas baik melalui aplikasi E-RB maupun melalui Google Drive.

Pelaksanaan RB dan ZI pada Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, diawali dengan keterlibatan dari seluruh komponen organisasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dapat dimaklumi pula bahwa organisasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi merupakan organisasi baru dengan komponen pegawai yang juga mengalami rotasi dan perlu menyesuaikan diri dengan bentuk organisasi baru. Selain dari pemahaman dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang perlu ditingkatkan, peran agen perubahan dan pelaksanaan pengembangan inovasi di lingkungan Deputy 3 perlu ditingkatkan agar di masa mendatang, tidak hanya mampu mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, namun juga mampu meningkatkannya. Inovasi ini perlu dilakukan tidak hanya pada hal yang bersifat besar dan sistemis, namun juga pada perubahan-perubahan kecil yang mampu meningkatkan kinerja dan kenyamanan kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.

Terakhir, terdapat pula peranan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dalam penanganan Covid dalam program Peningkatan Ekonomi Nasional dengan menggerakkan program padat karya pada proyek prioritas nasional.

Di masa mendatang, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi harus meningkatkan pelaksanaan RB Unit dan pembangunan ZI nya dengan melibatkan seluruh unsur organisasi dari Pimpinan hingga pada Jabatan Pelaksana, dengan tujuan untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi kepada seluruh sendiri pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi.

MANAJEMEN KEARSIPAN

1. Penandatanganan MoU antara Kemenko Marves dan ANRI

- Penandatanganan MoU Kemenko Marves diwakili oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritman dan Investasi bersama dengan ANRI.



Gambar 10 Penandatanganan MoU Sistem Kearsipan antara Kemenko Marves dan ANRI

2. Pemaparan Hasil Pekerjaan: Penataan Arsip Inaktif di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

- Deputy Infrastruktur dan Transportasi (Dr. Eng. Lukijanto): Kearsipan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- Arsip statis akan dimigrasikan menjadi arsip Nasional yang akan dijadikan memori Kementerian Koordinator Bidang Kemaritman dan Investasi. Yang di tata ini adalah kaitan dengan Kedeputan Infrastruktur dan Transportasi. Kedeputan lain untuk menata arsipnya (arahan Sesmenko).
- Penataan arsip tidak hanya sebatas di Kedeputan Infrastruktur dan Transportasi tetapi di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritman dan Investasi.
- Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip ada dua macam yaitu arsip dinamis dan arsip statis;



Gambar 11 Presentasi oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

3. Serah Terima Hasil Pekerjaan: Penataan Arsip Inaktif di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Serah terima hasil pekerjaan arsip inaktif diserahkan langsung oleh Kepala Pusat Jasa Kearsipan Drs. Bambang Surowo, M.Hum kepada Sekretaris Deputy Infrastruktur dan Transportasi Dr. Eng. Lukijanto, S.T.



Gambar 12 Serah Terima Hasil Pekerjaan Arsip Inaktif dari ANRI kepada Kedepuitan Infrastruktur dan Transportasi



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

1. Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Penandatanganan pernyataan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas (ZI) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan staf Kedeputian Infrastruktur dan Transportasi) disaksikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Umum.



2. Pedoman Pembangunan Zona Integritas

- Kebijakan transformasi birokrasi telah dibuat sampai 2025, yang dituangkan dalam roadmap berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- Strategi pelaksanaan RB 2020-2024: dilakukan evaluasi pelaksanaan RB tiap tahun baik secara Nasional (Makro dan Meso) dan Instasional (Mikro);
- Pelayanan public yang prima: dalam pelayanan public ada pelayanan public prima dan pelayanan public standard. Pelayanan public meliputi sarana dan prasarana perkantoran (ruang tamu, ruang tunggu, akses sanitasi dll). Pelayanan prima dimana ada perubahan-perubahan pelayanan public yang memudahkan masyarakat (akses pelayanan);



Gambar 13 Tanda Tangan Komitmen Bersama ZI di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

- Birokrasi yang *capable*: dilihat pada 8 area perubahan, kita dituntut untuk membuat *quick wins* yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat (satu tahun);
- Strategi pelaksanaan RB: ada tiga tingkatan yaitu Makro: yang dilakukan oleh tim independen reformasi birokrasi tingkatnya Nasional, Meso: pelaksanaan RB yang ditentukan oleh Sektor (kementerian/ lembaga/ badan), berdasarkan meso ada beberapa instansi yang akan melakukan pengukuran terhadap K/L tertentu dan Mikro (instasional) yaitu mencakup implementasi kebijakan. Saat ini Kemenko Marves sedang menuju RB 80% dan semoga tercapai target nilai RB 80%;
- Capaian pembangunan ZI: setiap tahun pengajuan ZI selalu naik. Ada beberapa catatan hasil evaluasi ZI EBK/ WBBM 2019 yaitu
 - Belum terlihat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 area perubahan;
 - Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir hanya mengejar nilai/ penghargaan. Kalau sudah ada rencana tindak lanjut harusnya ada hasil perubahan yang dihasilkan (mengacu kepada isu-isu strategis dan RB sendiri). PATEN: setelah punya sasaran, kita memiliki indicator setiap indicator memiliki data dukung atau eviden. Jangan hanya ada SK agen perubahan, rencana tindak lanjut agen perubahan tetapi tidak ada hasil/ output/ outcome. Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam move pelaksanaan ZI masih rendah;
 - Pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah;
 - Implementasi system pengawasan yang belum mantap, masih pada sekedar public campaign dan belum pada pembangunan secara sistematis;
 - Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada public menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan. Pada saat membuat laporan bagus, standard pelayanan bagus namun realita di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan (eviden). Ketika target tidak tercapai maka ada *punishment* dan jika berhasil maka akan ada *reward*;
 - Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder eksternal/ masyarakat belum dilakukan secara efektif;

- Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategi yang sesuai dengan harapan stakeholder. Setelah kita memiliki aplikasi apakah ada dampak kepada stakeholder atau tidak.

KOORDINASI PEMBAHASAN DOKUMEN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara hybrid (offline dan online) pada Selasa - Rabu/6 - 7 April 2021 di Ashley Hotel Jakarta Wahid Hasyim. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat program reformasi birokrasi sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (SKJ ASN).

Rakor dibuka oleh Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Rahman Hidayat yang kemudian dipimpin oleh Asdep Industri Maritim dan Transportasi, Firdausi Manti dan Kepala Bagian Administrasi Umum, Romi Firman mewakili Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.

Sesuai Permenpan RB Nomor 38/2017, setiap instansi pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil harus menyusun SKJ ASN. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan rekomendasi yang belum diselesaikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman pada saat itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2016 dan 2017.

Kemenko Bidang Kemaritiman dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan pola karir pegawai agar menyusun dan menetapkan SKJ.

Hadir dalam rapat, Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, Reformasi Birokrasi Kemenko Marves, serta kementerian teknis yang diwakili oleh para koordinator bidang sumber daya manusia, di antaranya Organisasi dan Tata Laksana dari Kementerian PANRB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Asdep Industri Maritim dan Transportasi menyatakan bahwa tugas utama Kemenko Marves yang utama adalah sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian. Yang membedakan tugas antardeputi adalah tanggung jawab dalam penyelesaian isu dan permasalahan program prioritas nasional yang dikoordinasikan.

Lebih lanjut, Asdep Firdausi mengatakan dokumen kamus kompetensi ini merupakan dokumen awal dalam penyusunan SKJ. Kamus kompetensi merupakan kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi, dan level kompetensi, serta indikator perilaku. Kamus kompetensi itu sendiri terdiri atas Kamus Kompetensi Manajerial, Kamus Kompetensi Sosial Kultural, dan Kamus Kompetensi Teknis..

Sementara itu, Kamus Kompetensi Manajerial dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural bagi JPT, Jabatan Administrasi (JA), dan Jabatan Fungsional (JF) telah disusun dan ditetapkan oleh Menteri PANRB melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN.

Di sisi lain, untuk Kamus Kompetensi Teknis disusun oleh setiap kementerian/lembaga (K/L) sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dan ditetapkan oleh setiap Pejabat Pembina Kepegawaian K/L setelah Kamus Kompetensi Teknis tersebut mendapatkan persetujuan Menteri PANRB.

Penetapan SKJ di Kemenko Marves untuk saat ini diprioritaskan bagi JPT, baik madya maupun pratama dan/atau jabatan eselon III dan eselon IV yang masih ada dan sifatnya hanya berlaku lokal di Kemenko Marves. Mekanisme dan prosedur penetapannya mengacu pada ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Menteri PANRB.

Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves, Iwa Gemino menyampaikan bahwa sejak Januari 2021, Biro Hukum telah menyiapkan draft kompetensi teknis, melakukan koordinasi dan fasilitasi serta pembahasan dengan perwakilan unit kerja untuk penyusunan kamus kompetensi teknis. Selain itu, telah dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Nomor 22/S Tahun 2021.

Dokumentasi





DUKUNGAN PENANGANAN COVID-19

Penanggulangan pandemi COVID-19 ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja. Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun demikian dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (New Normal). Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada tempat kerja khususnya perkantoran dan industri, dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.

Selain upaya penerapan tatanan normal baru di lingkungan kerja, secara pribadi, setiap pegawai diberikan perlindungan dan penguatan daya tahan tubuh. Alat pelindung diri pegawai dalam bekerja di kantor antara lain pelindung wajah (Face Shield), masker dan hand sanitizer. Sedangkan penguat daya tahan tubuh dilakukan dengan memberikan asupan vitamin dan protein yang meningkatkan imunitas tubuh.

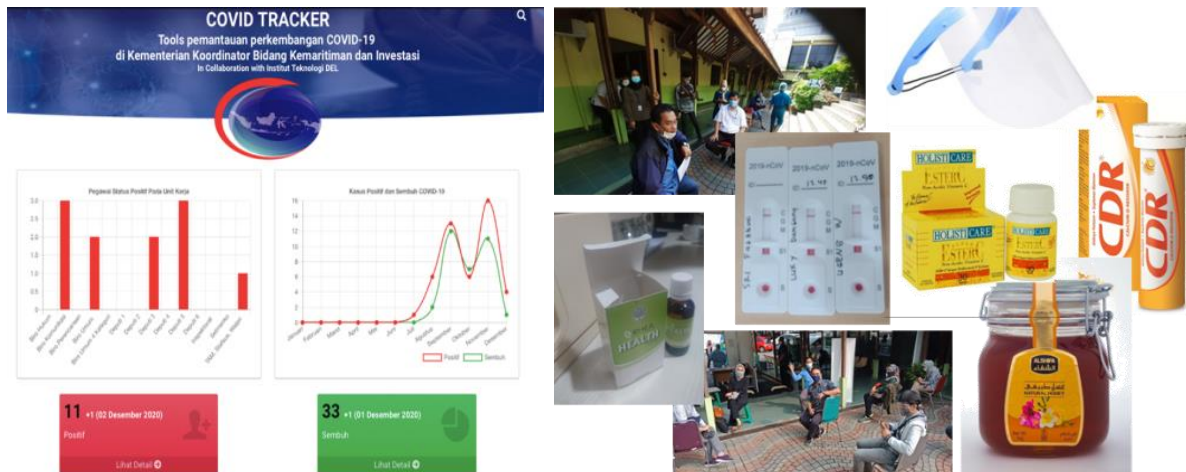
Guna mendeteksi dini ada atau tidaknya paparan COVID-19, dapat dilakukan pemeriksaan imunitas dan pemeriksaan infeksi virus yaitu melalui tes cepat (Rapid test) COVID-19 dan SWAB test COVID-19.

Tujuan dilakukan kegiatan Penangan COVID-19 di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi adalah:

- 1) Memfasilitasi pemeriksaan diri pegawai dari paparan COVID-19 melalui Rapid Test dan Swab Test;
- 2) Fasilitasi alat pelindung diri dalam bekerja di kantor untuk seluruh pegawai;
- 3) Pemberian suplemen dan vitamin sebagai peningkatan daya tahan tubuh dari COVID-19.

Adapun realisasi kegiatan penanganan COVID-19 di lingkungan Deputi 3 tahun 2020 adalah sebagai berikut

- 1) Layanan Swab Test dan Rapid Test utk seluruh pegawai D3 (PNS, TKK, OB dan driver):
 - a. Swab massal telah dilakukan 2 kali (September dan November);
 - b. Rapid test rutin, terutama sebagai dokumen persyaratan melaukan perjalanan dinas;
 - c. Swab test insidentil sebagai tindaklanjut hasil reaktif dari rapid test;
- 2) Pengadaan APD (Face shield, Hand Sanitizer, masker kain dan masker disposable) untuk seluruh pegawai PNS dan TKK.
 - a. Tahap I : terealisasi Juli 2021
 - b. Tahap II : Desember 2021
- 3) Penyediaan vitamin dan penambah daya tahan tubuh (Madu, CDR, Vit C, Susu UHT dan RHEA).
 - a. Tahap I : Juli 2021 (Madu, CDR, Vitamin C, Susu UHT)
 - b. Tahap II : November 2021 (Rhea)
 - c. Tahap III : Desember 2021 (susu, vitamin, madu)
- 4) Dukungan bantuan untuk pegawai positif COVID-19 pada masa perawatan dan isolasi di RS rujukan.
- 5) Pemantauan dan updating data pemantauan perkembangan COVID-19 melalui COVID TRACKER Marves.



- 1) Deputi 3 bersama Deputi 1,2 dan 4 menjadi wakil penilaian Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM ke Kementerian PAN RB;
- 2) Penilaian telah dilaksanakan pada 9 November 2020 dan saat ini menunggu hasil resmi dari Kementerian PANRB;
- 3) Capaian Deputi 3 dalam Implementasi Zona Integritas, antara lain:
 - a. Pembuatan Video Profil pelaksanaan Zona Integritas Deputi 3 dan dipublikasikan melalui Youtube, sebagai wujud keterbukaan informasi publik;
 - b. Inovasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas
 - Share point Deputi 3 : wujud pelaksanaan manajemen pengetahuan;
 - Penggunaan aplikasi keuangan
 - Optimasi penggunaan IT dalam penyimpanan data bersama
 - c. Layanan pengaduan kepada stakeholder dan masyarakat;
 - d. Keterlibatan seluruh pegawai dalam pelaksanaan RB dan ZI
 - e. Penetapan Agen Perubahan
 - Satu wakil Agen Milenial saat ini dalam proses seleksi Milenial Idol di Biro Hukum
 - f. Sosialisasi pelaksanaan ZI di lingkungan Deputi 3
 - g. Renovasi gedung untuk mewujudkan ruang kerja yang Aman, Nyaman, Produktif sesuai Adaptasi Kebiasaan Baru Kemenkes

RENOVASI RUANG KERJA LANTAI 16

Desain ruang kerja lantai 16 merupakan peninggalan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang belum pernah direnovasi, sehingga kurang memadai dengan kondisi organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi terutama dengan adanya perubahan organisasi sesuai dengan SOTK baru Kemenkomarves yang berdampak pada penambahan jumlah pejabat dan pegawai;

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, kondisi ruang kerja di lantai 16 dinilai belum sesuai persyaratan ruang kerja yang aman pada situasi pandemi COVID-19;

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan ruang kerja yang aman, nyaman dan produktif, Sekretariat Deputi 3 melakukan perubahan tempat kerja sebagai berikut:

- 1) Renovasi ruang kerja Deputi;
- 2) Renovasi dan penambahan ruang kerja Asisten Deputi dan Kepala Bidang;
- 3) Renovasi ruang staf;
- 4) Renovasi ruang pendukung lantai termasuk toilet dan ruang tamu
- 5) Selesaiya renovasi ruangan D3 Lt 16 akan dijadikan momentum untuk merapikan aset dan arsip di d3 sesuai tata tertib aset dan adminstrasi yg berlaku.



BAB 4 PENUTUP

Sesuai dengan amanat pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Surat Edaran Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No.SE-4/Sesmenko/Maritim/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016 Tentang Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Pelaporan Aparatur di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran 2021 yang merupakan pertanggung jawaban atas kinerja Unit Organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Tahun 2020-2024 yang terdiri dari program, sasaran strategis, indikator kinerja program dan target kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Tahun 2020 dan dilanjutkan dengan evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka dapat disampaikan kesimpulan, sebagai berikut:

KESIMPULAN

Secara keseluruhan target yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja unit eselon 2 telah tercapai, Walau mengalami beberapa kendala seperti adanya pandemi covid-19 dan refocusing anggaran yang dilakukan. Dapat terlihat pada perbandingan capaian tahun anggaran 2021 dengan tahun anggaran 2020 bahwa beberapa indikator kinerja utama mengalami peningkatan secara target maupun hasil outputnya. Hal ini didukung oleh optimalnya proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan para K/L yang berada dibawah naungan kemenko marves terutama deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi.

REKOMENDASI

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian dan evaluasi kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi untuk tahun 2021, dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Sumber Daya Air

Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Dasar

- Arah kebijakan dan fokus pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian MP jalan 3T pada lokasi yang belum berstatus Jalan Nasional - Pembangunan Jalan Trans Enggano masuk dalam rencana pembangunan Kementerian PUPR TA 2022;
- Usulan penambahan unit rumah susun di Kota Pekalongan melalui Ditjen Perumahan Kementerian PUPR – Kunlap tanggal 09/09/2021;
- Koordinasi dengan Ditjen SDA terkait air bersih, koordinasi dengan pengelola simpang susun KITB agar dibuka akses untuk keluar masuk kendaraan ke lokasi proyek dan terkait IPAL agar KITB berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya dilakukan secara parallel – koordinasi dan pendampingan kepada KITB untuk percepatan

Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Perkotaan

- Usulan penyiapan Pra FS Pembangunan Feeder Tol (Usulan Pembangunan Tol Dharmasraya)
- Koordinasi PPK – PT. CKJT dan Kanwil Kemenag Jabar – Deputi Infrastruktur mengawal;
- Alternatif solusi pembiayaan infrastruktur dengan skema lain;
- Pembentukan Tim Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing di DKI Jakarta dan Jawa Barat berdasarkan SK Deputi Infrastruktur dan Transportasi

Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai

- Melaksanakan rakortek dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan izin pengalihan alur sungai yang akan menjadi bahan masukan pengambilan putusan kebijakan;
- Kunjungan Deputi Infrastruktur 10/04/2021 dan Rakor Pengamanan Abrasi Kab. Jembrana 03/12/2021 – Penanganan abrasi Pantai Gilimanuk masuk dalam usulan penanganan TA 2022 melalui BWS Bali Penida

Tugas Tambahan Asdep IDPSDA – Rapat Koordinasi Menko Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di 8 Provinsi

- Mencari solusi/ alternatif pembiayaan lain (melalui skema tertentu) berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur di masing-masing Provinsi yang bersifat prioritas dan mendesak;
- Mengintegrasikan kegiatan/ proyek di masing-masing Provinsi agar sejalan dengan amanat Perpres 18/ 2020 (RPJMN 2020-2024) dan Perpres 109/2020 (PSN) – Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat;
- Melaksanakan Rakor Teknis, Kunjungan lapangan dalam rangka Tindak lanjut arahan kebijakan Menteri Terkait.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah

Percepatan Pengembangan Kota Baru Sofifi

- Perlu percepatan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Sofifi
- Kementerian ATR/BPN akan memasukkan bantek penyusunan RDTR Kota Sofifi di tahun 2022
- Percepatan Penyusunan Regulasi Draft Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kota Sofifi dengan penajaman materi antara Kemendagri, Kemenko Marves, K/L terkait, serta Pemda

Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

- Koordinasi Rencana Aksi dan Pendampingan Tindak Lanjut Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
- Koordinasi bersama semua pemangku kepentingan terhadap penyelesaian *bottlenecking* yang ada pada rencana aksi Perpres 87/2021
- Pendampingan tindak lanjut pada pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan yang terlampir pada rencana aksi Perpres 87/2021

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

- Rumusan Kepmenko Maritim dan Investasi tentang Gugus Tugas Pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas

Urban Transport

1. Urban Mobility Plan di 6 Kota Metropolitan dan Raperpres untuk Percepatan Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan oleh Bappenas
2. Monitoring Prakarsa Infrastruktur Hijau (GII) melalui Kerjasama Bilateral RI - Jerman untuk menyediakan bantuan keuangan (dari KFW Development Bank) 2,5 miliar EUR dan bantuan teknis (dari GIZ) 4,4 juta EUR melalui dana hibah

Tanjung Pinggir, Batam

1. Monitoring rencana Pembentukan Tim Task Force dan studi kelayakan rencana pembangunan Pelabuhan Tj. Pinggir oleh PT SMI
2. Monitoring optimalisasi Pembangunan STS (Ship To Ship) dan FSU (Floating Storage Unit)

Pelabuhan Kijing

1. Monitoring proses Recovery pasca Insiden Terminal Kijing, Pembebasan lahan Terminal Kijing dan jalan nasional, serta Rencana pengembangan KEK Mempawah.

Bali Maritime Tourism Hub

1. Monitoring rencana pembentukan *Task Force* Percepatan Pengembangan *Bali Maritime Tourism Hub* dan Infrastruktur *Cruise*

Pemberdayaan Pelayaran Rakyat

1. Sosialisasi Perpres 74 /2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
2. Penyempurnaan layanan microsite <https://pelra.maritim.go.id>

Pelabuhan Sabang (Andaman-Nicobar)

1. Monitoring Pelabuhan Sabang melalui kerjasama Ri – India terutama dukungan kajian VTS untuk Distrik Navigasi dan surat tanggapan atas Pre-FS RITES

Standarisasi Pelabuhan

1. Mengawal Perdirjen Hubla terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial
2. Target Standarisasi Pelabuhan Tahun 2022 → 8 Pelabuhan (6 dari Segi infrastruktur, 8 dari segi operasional)

Pelabuhan Ambon Baru (Ambon New Port)

1. Mengawal Kajian PT SMI Studi Pendahuluan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (“KPBU”) (yang terintegrasi dengan kajian hidro oceanografi dan peta laut oleh Pushidrosal, serta potensi perikanan hasil wawancara pelaku perikanan tangkap di wilayah Ambon sekitarnya)

Makassar Pare-pare Multimoda

1. Monitoring target penyelesaian konstruksi pada bulan Juli/Agustus 2022 dan rencana operasional pada akhir tahun 2022

Seaplane

1. Mengawal penyusunan Rperpres Seaplane dan rencana pengembangan Seaplane di Indonesia

Pelabuhan Patimban

1. Monitoring Pengembangan Pelabuhan Patimban Fase I-2 (2021 – 2023): Terminal petikemas, terminal kendaraan, dan ro-ro terminal

Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur

Infrastruktur Digital

1. Percepatan dukungan infrastruktur digital aktif dan pasif untuk mendukung realisasi program National Logistic Ecosystem
2. Percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas jangkauan 4G di daerah non ekonomis dan 3T

Pengembangan Kawasan Industri

1. Percepatan realisasi target RPJMN thd 9 KI prioritas nasional dan 18 kawasan industri yang akan dikembangkan realisasi program Two countries twin parks

Industri Bahan Baku Pendukung Infrastruktur

1. Pengembangan Industri & Peningkatan kebutuhan & Penggunaan AsButon
2. Koordinasi Industri penyedia bahan baku batere (KI Wedabay ; KI Obi ; IBC)
3. Koordinasi industri logam untuk Infrastruktur (KI Galang Batang ; KI Morowali ; KI Wedabay; KI Konawe, KI JIPE – PT FI)

Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi

Industri Galangan Kapal Nasional

1. Koordinasi Kemenperin, Kemenko Ekon, Kemenkeu, BPPT, BUMN, dan Asosiasi Pelaku Industri
2. Telah terbit aturan Revisi Permendag No.76 Tahun 2019 yaitu Permendag No.20 Tahun 2021

Industri Komponen Kapal

1. FGD kemampuan industri komponen kapal DN dan Penyusunan skema/komposisi TKDN dalam pembangunan kapal negara
2. Pembahasan khusus terkait pasal-pasal untuk meminimalisir impor kapal perikanan baru dan/atau bekas.

Industri Kedirgantaraan

1. kolaborasi di antara regulator, manufaktur, operator, dan *financier dalam percepatan pengembangan Pesawat N219 Amphibi*
2. Koordinasi PSN pengembangan drone, PRN pengembangan pesawat dan industri komponen

Industri Perkeretaapian

1. Koordinasi lebih lanjut untuk mendorong kolaborasi antar sektor dan koordinasi industri komponen dengan operator/integrator industri kereta api

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Pemantauan P3DN prioritas pada sektor energi (PLN & Pertamina), Alat Kesehatan, dan pengadaan TIK di Kemendikbudristek sejak tahap perencanaan
2. Pengembangan Sistem P3DN terintegrasi & online (SIRUP, KRISNA, database PDN, BKPM, Bea Cukai)
3. Program lanjutan sertifikasi TKDN gratis tahun 2022 untuk mendorong substitusi impor 35%
4. Pengesahan Kepmenko Pokja Timnas P3DN

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

1. Koordinasi penyusunan Penggunaan KBLBB di lingkup K/L/PD/BUMN/D
2. Pengesahan Revisi Permenperin 27/2020
3. Sosialisasi dan perluasan program konversi sepeda motor untuk mendukung target sepeda motor konversi 6 juta unit pada Tahun 2025 & Pengesahan Revisi Permenhub 32/2020
4. Penyelesaian Revisi Permen ESDM 13/2020
5. Koordinasi kesiapan dukungan KBLBB pada KTT G20

LAMPIRAN

Daftar Lampiran berupa :

1. PK 2021
2. Kertas Kerja Kebijakan
3. ND Penilaian SAKIP
4. Laporan Presentasi SDM